



VOLUME XIII / NO. 126 / MARET 2018

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

KESETARAAN PAJAK UNTUK E-COMMERCE

e-commerce telah menyita sebagian pola konsumsi masyarakat. Diprediksi e-commerce akan menjadi tulang punggung ekonomi nasional di masa depan. Pajak e-commerce menjadi solusi level playing field demi keharmonisan dunia perdagangan digital dan konvensional.



Daftar Isi



5	DARI LAPANGAN BANTENG
6	EKSPOSUR
10	LINTAS PERISTIWA

LAPORAN UTAMA	
15	Kesetaraan Pajak bagi Para Pelapak
18	Infografis
20	Keadilan Untuk Semua Kalangan
23	Mekanisme Perpajakan
25	Tidak Ada Jenis Pajak Baru

WAWANCARA	
27	Ke Bandara Lebih Mudah dengan Kereta

POTRET KANTOR	
30	KPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya Kesetaraan Gender Menjadi Poin Penting

FIGUR	
32	Pendidikan Kunci Kehidupan

EKONOMI TERKINI	
36	Perekonomian Indonesia Siap Lepas Landas

KOLOM EKONOM	
40	Kebijakan Fiskal dan Pola Konsumsi Rumah Tangga Indonesia
GENERASI EMAS	
44	Mengabdi Setelah Menyelesaikan Studi
OPINI	
46	Kebijakan Perpajakan untuk E-Commerce

REGULASI	
48	Agar Perekonomian Desa Maju, Mekanisme Dana Desa Diubah

INSPIRASI	
50	Apresiasi Pekerja Seni di Birokrasi

RENUNGAN	
52	Memberi untuk Menerima

Film	
53	Film Superhero 'Revolutioner' dari Marvel

JALAN-JALAN	
54	Surga Kecil di Sulawesi Utara

SELEBRITI	
56	Musik Adalah Bahasa

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Suliastuti. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulistyio, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S., Riva Setiara, Adya Asmara Muda, Hadi Surono, Ali Ridho, Agung Sudaryono, Budi Prayitno, Muchamad Ardani. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Resha Aditya Pratama, Rostamaji, Adelia Pratiwi, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Arif Nur Rokhman, Maria Cecilia Kinanti, Ferdian Jati Permana, Hadi Surono, Sugeng Wistriono, Muchamad Ardani, Adhi Kurniawan, Andi Abdurrochim, Shinta Septiana, Muhammad Fabhi Riendi, Ika Dewi Puspitasari, Nur Muhlisin,. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Eko Prihariyanto, Andi Al Hakim, Rhoric Andra F., Muhammad Fath Kathin, Arif Setiawan, Putra Lusumo Bekti, Adhi Kurniawan, Nur Iman, . **Desain Grafis dan Layout:** Arfindo Briyan Santoso, Venggi Obdi Ovisa, Victorianus M.I. Bimo, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.



MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play

Mengatur perpajakan pada transaksi digital



Lapor SPT

Lebih Awal • Lebih Nyaman

Lapor SPT Tahunan Pajak Penghasilan secara *online*.
Gunakan e-filing dan lapor lebih awal
demi kenyamanan bersama.

djponline.pajak.go.id



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Bisnis *e-commerce* di Indonesia telah memasuki tahapan baru. Kemajuan teknologi dalam bidang perdagangan *e-commerce* ini bukan hanya tumbuh sangat pesat di Indonesia, namun juga ekosistem yang menyertainya akan meningkat pesat. Ekosistem yang menyertai bisnis ini *e-commerce* ini perlu dijaga, sehingga dapat sepenuhnya mendukung bisnis *e-commerce*. Contohnya adalah bisnis jasa pengiriman barang, jasa pengiriman uang, jasa pembuatan aplikasi dagang, dan lain-lain.

Kebijakan pemerintah terkait *e-commerce* ini juga perlu terintegrasi agar tidak terjadi tumpang tindih atau saling menegasikan. Untuk itu, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan beberapa kementerian lainnya untuk merumuskan regulasi pajak *e-commerce* yang nantinya berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Contoh kasus, pembelian barang dari luar negeri via *e-commerce*. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak hanya mengatur keabsahan transaksinya, tapi perlu juga mengatur bagaimana perlakuan barang tersebut ketika memasuki wilayah

pabean Indonesia sampai dengan barang tersebut diterima pembelinya.

Dengan semakin meningkatnya transaksi *e-commerce* ini, banyak pihak yang mulai menyadari pentingnya sebuah kebijakan dan informasi yang menyeluruh, agar industri ini dapat tumbuh berkembang. Dimulai dari pendataan transaksi nilai dan volume perdagangan *e-commerce* oleh Badan Pusat Statistik di awal Januari 2018. Pendataan ini akan memperkuat basis data pengambilan keputusan dalam kebijakan *e-commerce*.

Selanjutnya, tentu para pelaku *e-commerce* berharap agar kebijakan yang dikeluarkan tidak akan menghambat pertumbuhan industri *e-commerce* di Indonesia. Sebenarnya yang pemerintah pastikan adalah bahwa pajak yang terutang melalui transaksi konvensional dan pajak yang terutang melalui transaksi *e-commerce* telah dipungut sesuai aturan yang berlaku. Sehingga, pedagang yang berjualan secara konvensional ataupun melalui *e-commerce* sama-sama telah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, konsumen yang berbelanja melalui pedagang konvensional ataupun

e-commerce juga dikenakan pajak yang sama.

Dalam perkembangannya, pemerintah akan melakukan pengaturan terkait tata cara pemungutan pajak yang terutang di industri *e-commerce*. Tidak ada perbedaan tarif pajak yang dikenakan atas transaksi melalui *e-commerce* dengan transaksi melalui cara konvensional. Pemerintah hanya mengatur agar pedagang yang berjualan melalui *e-commerce* menyetorkan sebagian kecil pajak yang terutang dari transaksi tersebut (PPN dan PPh). Dengan demikian, pajak yang disetorkan dapat dihitung sebagai kredit pajak.

Terakhir, apapun kebijakan yang diambil pemerintah untuk bisnis *e-commerce*, perlu sosialisasi yang baik agar kebijakan ini dapat diterima. Pola komunikasi yang intensif dan melibatkan pihak pelaku bisnis *e-commerce*, dapat meminimalisasi gejolak dan resistensi terhadap kebijakan *e-commerce*.

Nufransa Wira Sakti,
Kepala Biro Komunikasi dan
Layanan Informasi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
@kemenkeuRI

Sampaikan optimisme kamu mengenai rencana pemerintah dalam memungut pajak bagi keadilan perdagangan konvensional dan *e-commerce*!

@pennyfebriana

Dr perspektif Pemerintah, adanya ketimpangan daya saing yg mengganggu keseimbangan lingkungan bisnis (konvensional & *e-commerce*) perlu diatasi segera. Sehingga langkah @KemenkeuRI adalah tepat dan akan sangat positif u/ pertumbuhan ekonomi

Pahami *e-commerce* yang unik dan dinamis, rumuskan kebijakan pajak yang menguntungkan dan adil baik u/ negara, masyarakat, dan pelaku bisnis akan menjadi tantangan besar, namun pasti bs dicapai dgn SDM

@bellyprofil

Melihat kebutuhan n antusiasme masyarakat, bisnis *e-commerce* akan semakin berkembang. Bkhan bkn tdk mungkin akan melampaui jumlah trnsaksi perdagangan konvensional. Perlu dibuat aturan perpajakan yg adil, jelas, tegas, n tidak rumit dalam pelaksanaannya.

@matpriyadi

Pajak pd *e-commerce* mrpkn bntk pengakuan bisnis ol pmrth. laju pertum e commerce di indo sgt tinggi, agar tdk ada slg bunuh bisnis antar plku usaha dan mcptkn level playing of field y sm baik konven maupun *e-Commerce* pemerintah hrs mrnpkn kbjkn tsb.



www.kemenkeu.go.id



KemenkeuRI



@KemenkeuRI



KemenkeuRI



KemenkeuRI



majalahmediakeuangan

Pemusnahan Terbesar Barang Ilegal

Pemusnahan dengan skala terbesar tercatat sudah dalam sejarah penindakan Bea dan Cukai. Barang-barang tersebut antara lain berupa 142.519 botol minuman keras (miras), 12.919.499 batang rokok, 1.008.624 keping pita cukai, 720 liter etil alkohol, dan 11.974 kemasan obat-obatan, kosmetik, serta suplemen.

Selain itu, Ditjen Bea dan Cukai bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain untuk mengungkap penyelundupan 12.144 unit ponsel dari beberapa lokasi di Jakarta, Depok, dan Tangerang. Dari miras dan ponsel ilegal tersebut, diperkirakan nilai kerugian negara sekitar Rp260,3 miliar. Pemusnahan terbesar ini dilakukan di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (15/2/2018).

Foto
Muhammad
Faishal Hafizh

Kreativitas Tanpa Batas di "Kota Ukir"

Corak ukir Jepara merupakan gambaran dari rangkaian tanaman yang menjalar, dan di tengahnya selalu menampilkan kumpulan dedaunan atau buah buahan dengan pola melingkar. Diukir dipermukaan Kayu Jati dengan dominasi gambaran tanaman yang menjalar, menjadikan ukiran Jepara ketika dilihat akan memberikan kesan yang tidak kaku. Kesan inilah yang menjiwai para pengrajin ukiran di Jepara untuk selalu berinovasi dalam menghasilkan karya yang indah dengan motif yang selalu berubah mengikuti perkembangan jaman. Sehingga wajar jika hasil karya mereka selalu digemari oleh para penikmat ukiran di Nusantara bahkan di Dunia.

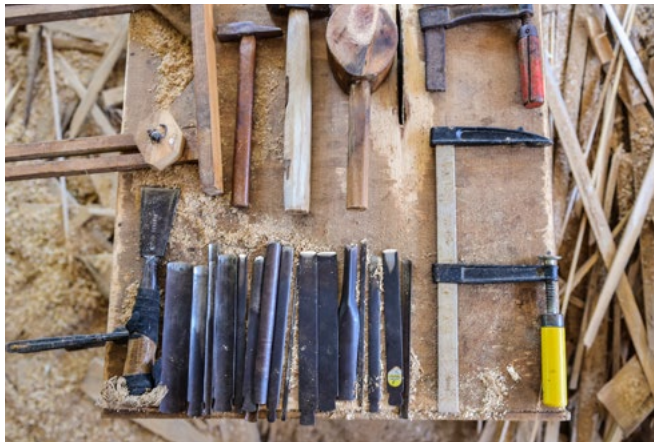


Foto dan teks
Tino Adi P.





11/02

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Raih Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendapatkan Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Arab Emirates (UAE). Penghargaan tersebut diserahkan oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum di Dubai pada minggu (11/02). Penghargaan Menteri Terbaik ini merupakan penghargaan global yang diberikan kepada satu orang menteri dari semua negara di dunia setiap tahunnya dan mulai diberikan pada tahun 2016. Proses seleksi dan penentuan pemenangnya dilakukan oleh lembaga independen Ernst & Young dan diselenggarakan oleh World Government Summit.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufrensa Wira Sakti melalui siaran pers-nya menyebutkan bahwa Menkeu menyampaikan apresiasi menjadi penerima pertama dari Asia yang menerima penghargaan tersebut. Ia mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja kolektif pemerintah dibawah pimpinan Presiden Jokowi, khususnya dibidang ekonomi. Menkeu

juga menegaskan bahwa ia mendedikasikan penghargaan tersebut kepada 257 juta rakyat Indonesia dan 78.164 jajaran Kemenkeu yang telah bekerja keras untuk mengelola keuangan negara dengan integritas dan komitmen tinggi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan.

Sebagai informasi, World Government Summit merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan di Dubai, UAE, dan melibatkan segenap pemimpin pemerintahan dari seluruh dunia dalam suatu forum dialog global tentang proses pemerintahan dan kebijakan publik serta kaitannya dengan teknologi, inovasi, dan topik lain. Forum ini menjadi ajang pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara pejabat pemerintah, penentu kebijakan, pakar, dan pimpinan sektor swasta untuk melihat tren masa depan dan implikasinya bagi kemanusiaan. World Government Summit dihadiri lebih dari oleh lebih dari 4.000 peserta dan 90 pembicara dari 150 negara dan lembaga internasional.

23/01

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Konferensi Pers Pertama Komite Stabilitas Sistem Keuangan Tahun 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama ketiga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yaitu Ketua Dewan Komite Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo dan Ketua Dewan Komite Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah, memberikan paparan terkait kondisi sistem keuangan di Indonesia pada konferensi pers yang diadakan di gedung Djuanda Kementerian Keuangan pada Selasa (23/01), Ia menyampaikan kondisi dari sistem keuangan Indonesia terkendali dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi di Indonesia. “Kondisi stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan tetap terkendali dalam rangka mendukung momentum pertumbuhan perekonomian nasional yang ditopang dengan daya tahan perekonomian yang kian membaik,” jelas Menkeu.



01/02

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Menjadi *Keynote speech* dalam acara Forum Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2018

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam kebijakan fiskal untuk menunjang sektor perdagangan ada kebijakan yang sifatnya langsung dan tidak langsung. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Forum Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2018 dengan tema Akselerasi Perdagangan di Era Ekonomi Digital bertempat di Hotel Borobudur Jakarta pada Kamis (01/02). Menurut Menkeu mengenai kebijakan yang sifatnya langsung, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berperan dalam pembentukan lembaga pembiayaan yang memiliki penugasan khusus dalam rangka meningkatkan ekspor Indonesia. "Di dalam Republik Indonesia kita sudah membentuk apa yang disebut Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Eximbank nya Indonesia. Dia didirikan dengan suatu Undang-Undang yang khusus yang tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan kapasitas kemampuan ekspor di Indonesia," jelasnya.meningkatkan kapasitas kemampuan ekspor di Indonesia," jelasnya.

30/01

Teks
KPPN Rengat

Foto
KPPN Rengat

PKN STAN Goes to Village

KPPN Rengat mengadakan acara Cerdas Cermat DAK Fisik dan Dana Desa, Seminar Anti Korupsi dan Penandatanganan Pakta Integritas untuk tiga wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan Kuantan Singingi yang diselenggarakan pada hari Selasa (30/01) di Gedung Dang Purnama Rengat, Riau. Dalam sambutannya, Kepala KPPN Rengat, Hermawan Sukoasih mengapresiasi peran para pemimpin daerah dalam pengelolaan Dana Desa. “Kehadiran para bupati/wakil bupati dan para pemimpin daerah dalam acara Cerdas Cermat DAK Fisik dan Dana Desa juga menjadi bukti bahwa para pemimpin daerah menghendaki para pengelola keuangan selalu belajar untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik lagi dalam pengelolaan Dana Transfer ke Daerah khususnya DAK Fisik dan Dana Desa,” jelasnya.



07/02

Teks
Biro KLI

Foto
Biiro KLI



Media Keuangan Raih Gold Winner InHouse Magazine 2018

Media Keuangan berhasil mempertahankan gelar gold winner dalam ajang The 7th SPS Inhouse Magazine (InMA) tahun 2018 di Padang pada Rabu (07/02). Penghargaan bergengsi tersebut diberikan untuk mengapresiasi dua buah karya sampul muka (cover), baik versi *e-magazine* maupun cetak. Media keuangan dinilai paling menarik dalam menyajikan desain sampul untuk edisi Agustus 2017 (versi *e-magazine*) dan April 2017 (versi cetak). Kedua penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua SPS Pusat. InMA merupakan ajang paling bergengsi bagi industri media cetak, khususnya untuk kategori majalah internal. Tak hanya mengapresiasi jenis media cetak tersebut, perhelatan tersebut juga memberikan penghargaan jenis lain, diantaranya adalah ISPRIMA (media cetak institusi pendidikan), IYRA (pembaca muda), dan IPMA (media cetak).

08/02

Teks
Biro KLI

Foto
Biiro KLI



Kuliah Umum Menkeu di Universitas Andalas

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan kuliah umum di Convention Hall Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat pada Kamis (08/02). Menkeu menyampaikan apresiasinya kepada universitas Andalas karena ikut berupaya mencerdaskan Indonesia dengan membangun pusat-pusat kajian melalui dana transfer daerah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPB). "Saya berterima kasih. Sampai hari ini Universitas Andalas termasuk center yang ikut mencerdaskan daerah-daerah. Saya ingin center itu terus dilakukan. Maka saya minta kepada Dirjen Perimbangan Keuangan terus mengembangkan center-center di daerah untuk meningkatkan kualitas dari Pemerintah Daerah karena desentralisasi dan otonomi daerah, transfer dana (dilakukan) langsung ke daerah," ungkapnya.

15/02

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Konferensi Pers Bersama Hasil Penindakan Ponsel Ilegal dan Miras Ilegal Serta Pemusnahan Terbesar Barang-Barang Hasil Penindakan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemusnahan terhadap barang-barang ilegal pada 'Konferensi Pers Bersama Hasil Penindakan Ponsel Ilegal dan Miras Ilegal Serta Pemusnahan Terbesar Barang-Barang Hasil Penindakan' di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), Jakarta, Kamis (15/02). Ini merupakan jumlah pemusnahan terbesar dalam sejarah penertiban impor/cukai ilegal dan merupakan sinergi dari para aparat penegak hukum, Kementerian/Lembaga (K/L), dan masyarakat "Untuk yang bentuknya miras atau minuman beralkohol, nilai barangnya adalah 87 miliar dengan tingkat kerugian estimasi bagi negara Rp250 miliar. Kemudian ponsel ilegal, nilai barangnya adalah Rp59,6 miliar dan kerugian negara estimasi adalah Rp10,3 miliar," paparnya.



21/02

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengadakan acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 dengan tema "Modernisasi dan Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran untuk Mengawal APBN yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel" di Gedung Dhanapala Jakarta pada Rabu (21/02). Pada acara ini, Menteri Keuangan (Menkeu) menyampaikan kritik kepada para K/L yang dinilai belum optimal digunakan mengelola anggarannya. "Kita punya tujuan, kita punya uang, tapi kalau sampai tidak bisa mengeksekusi itu adalah kekonyolan kita sendiri. Kesalahan tidak kepada siapa-siapa tapi kita semua, anda semua sebagai penanggung jawab untuk bisa membelanjakan Rp847,4 triliun secara baik," tambahnya.

19/02

Teks
BPPK

Foto
BPPK

Kemenkeu Mengadakan Executive Gathering 2018

Sebanyak 1.674 Mahasiswa dan Dosen PKN STAN dilepas oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Astera Primanto Bhakti dalam Program "PKN STAN Goes To Village". PKN STAN Goes To Village merupakan suatu pengabdian masyarakat PKN STAN dalam upaya meningkatkan pemahaman dan pendampingan dalam mengelola keuangan desa. PKN STAN Goes To Village dilaksanakan tanggal 19-24 Februari 2018 di 230 desa yang terdiri dari 129 desa di Kabupaten Tangerang, 100 desa di Kabupaten Bogor, dan 1 desa di Kabupaten Lebak. PKN STAN Goes To Villages diselenggarakan sesuai amanat Presiden Jokowi melalui Menteri Keuangan untuk mengimplementasikan Nawacita butir ketiga yakni "Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan"





Mudahnya konsumen bertransaksi via e-commerce membuat bisnis konvensional turun signifikan.

Foto
Resha Aditya P.

KESETARAAN PAJAK BAGI PELAPAK

Kini dunia telah memasuki era digital. Pola aktivitas masyarakat pun berubah di berbagai hal. Untuk membeli buku tak perlu ke toko buku, cukup mengunduh *e-book* (elektronik book) dari aplikasi di *smartphone*. Toko buku *online* pun kini banyak bertebaran. *Marketplace* tak ubahnya layaknya pasar tradisional tempo dulu yang selalu riuh oleh pembeli. Berbelanja apa saja kini semuanya bisa dilakukan dalam genggam.

Tak bisa dipungkiri, kemajuan teknologi informasi yang melonjak pesat berbanding lurus dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia dalam kurun satu dekade terakhir. Berdasarkan We Are Social & Hootsuite's Digital in 2017 Report, pengguna internet di Indonesia per Januari 2018 telah mencapai 132,7 juta orang. Pesatnya pertumbuhan pengguna internet tak pelak berpengaruh pada beralihnya tren perdagangan dari konvensional ke digital.

Semakin mudah dan nyamannya konsumen melakukan transaksi jual beli melalui *e-commerce* (*electronic commerce* atau perdagangan elektronik), membuat transaksi perdagangan konvensional turun secara signifikan. Data Pertumbuhan Nilai Transaksi *e-commerce* di Indonesia menunjukkan pada tahun 2011 sebesar Rp13,5 triliun (sumber: Bank Indonesia, Katadata). Nilai tersebut terus merangkak naik menjadi Rp47 triliun pada tahun 2015, Rp75 triliun pada tahun 2016, dan diproyeksikan pada tahun 2018 menjadi Rp102 triliun.

"Pada prinsipnya, (regulasi pajak *e-commerce* ini) akan dilakukan secara *even handed* (perlakuan secara adil), artinya *playing field*-nya sama."

Sri Mulyani
Menteri
Keuangan RI

E-commerce merupakan suatu transaksi komersial secara elektronik. Sama halnya dengan perdagangan konvensional, pemerintah berwenang untuk memastikan kepatuhan pajak bagi pelaku *e-commerce* di Indonesia. Pelaku dalam transaksi konvensional selama ini telah memberlakukan peraturan perpajakan. Kegiatan ekonomi dalam *e-commerce* inilah yang belum terekam pemerintah. Untuk itu, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan beberapa kementerian lainnya kini tengah merumuskan regulasi pajak *e-commerce* yang nantinya akan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Pada prinsipnya, (regulasi pajak *e-commerce* ini) akan dilakukan secara *even handed* (perlakuan secara adil), artinya *playing field*-nya sama," tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Pusat Bea dan Cukai, Jakarta, Jumat (19/1). Maka, filosofi penerapan aturan pajak *e-commerce* ini yakni agar pelaku perdagangan baik konvensional maupun elektronik mampu memahami kewajiban perpajakannya.

Berawal dari Paket Kebijakan Ekonomi XIV

Formulasi peraturan mengenai *e-commerce* di Indonesia pada dasarnya telah disusun dua tahun lalu. Pada 11 November 2016, pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XIV tentang Peta Jalan (*Roadmap*) *e-Commerce* di Indonesia. Paket kebijakan ini diinisiasi karena belum ada peta jalan *e-commerce* nasional yang akan mendorong tumbuh kembangnya *e-commerce* di Indonesia.

Berikut beberapa poin penting yang diatur dalam Paket Kebijakan Ekonomi XIV. Pertama, di sektor pendanaan melalui Kredit Usaha Rakyat untuk *tenant* pengembangan *platform*, dana Universal Service Obligation (USO) untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) digital dan *start-up e-commerce platform*.

Kedua, di sektor perpajakan melalui pengurangan pajak bagi investor lokal yang berinvestasi di *start-up*, Penyederhanaan izin prosedur perpajakan bagi *start-up e-commerce* dengan omzet dibawah Rp4,8 miliar per tahun melalui pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan (PPh) dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dengan demikian, PPh final hanya sebesar 1 persen.

Ketiga, di sektor perlindungan konsumen melalui harmonisasi regulasi yang menyangkut sertifikasi elektronik, proses akreditasi, kebijakan mekanisme pembayaran, perlindungan konsumen dan pelaku industri *e-commerce*, serta skema penyelesaian sengketa.

Selain itu, poin-poin penting lainnya juga mengatur tentang edukasi mengenai kesadaran *e-commerce*, dukungan sistem logistik untuk mempercepat pengiriman dan mengurangi biaya pengiriman, pembangunan jaringan *broadband* berkecepatan tinggi, meningkatkan *public awareness* tentang kejahatan dunia maya serta menyusun SOP terkait penyimpanan data konsumen,

serta pembentukan manajemen pelaksana untuk memonitor Peta Jalan *e-Commerce* di Indonesia.

Berdasarkan peta jalan (*roadmap*) itulah Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, serta pelaku *e-commerce* di Indonesia untuk merumuskan aturan pajak *e-commerce*. "Pemerintah akan mengidentifikasi seluruh pelaku *e-commerce*, baik *merchant* di *marketplace*, *over the top*, maupun yang melakukan transaksi individu di Facebook atau Instagram" ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (23/1).

Terkait hal ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara menegaskan bahwa pemerintah tidak menciptakan jenis pajak baru untuk *e-commerce*. "Dalam peraturan nanti akan dijelaskan apabila transaksinya terutang pajak ya berarti harus memenuhi kewajiban perpajakan, jadi jangan hanya dikira untuk *marketplace* saja," jelasnya.

Suahasil menambahkan, perkembangan *e-commerce* di Indonesia akan semakin melejit dalam beberapa tahun ke depan. Model transaksi baru yang lebih modern bisa saja muncul menggantikan tren *e-commerce* yang ada saat ini. Maka, pemerintah perlu menerapkan *level playing field* (kesetaraan perlakuan pada pelaku usaha) antara perdagangan konvensional dengan digital.

Dalam pertemuan Kementerian Keuangan dengan Asosiasi *e-Commerce* Indonesia (idEA) pada akhir Januari silam, terdapat dua usulan utama yang menjadi perhatian dari pelaku bisnis digital tersebut. Pertama, penyedia *platform* perlu diberikan waktu yang cukup untuk dapat menyiapkan sistem agar dapat melakukan penyetoran pajak yang terutang dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) virtual terhadap pelaku *e-commerce*. Kedua, menginginkan



Nilai transaksi *e-commerce* berkembang pesat tiap tahunnya.

Foto
Anas Nur Huda

agar kewajiban penyetoran pajak yang terutang berlaku untuk semua penyedia model *platform* yaitu *marketplace*, *social media*, *classified ads*, dan lain-lain.

Diutamakan untuk peningkatan basis pajak

Terkait rencana penerapan pajak *e-commerce*, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudistira, mendukung penuh kebijakan pemerintah demi keadilan bagi pelaku bisnis konvensional maupun digital. Bank Indonesia mengasumsikan pertumbuhan nilai transaksi *e-commerce* pada tahun 2018 sebesar Rp102,6 triliun. Jika penerapan PPN 10 persen diberlakukan, maka potensi pajak *e-commerce* per tahunnya sebesar Rp10,2 triliun.

Bhima menambahkan, "Sebagai permulaan setelah PMK resmi ditetapkan, pemerintah harus sadar bahwa tahun pertama penerapan aturan pajak *e-commerce* sebaiknya sekedar peningkatan basis pajak." Dengan bekerjasama melalui platform *e-commerce*, pemerintah bisa melakukan sosialisasi kewajiban memiliki NPWP karena masih banyak pelapak UMKM yang belum memiliki NPWP.

Kemudian tahap berikutnya baru melakukan peningkatan kepatuhan. "Tahap ini pun harus hati-hati karena pelapak di *platform e-commerce* beberapa juga berdagang di media sosial sehingga sulit dilacak. Jangan sampai yang berjualan di *platform e-commerce* dipungut pajak, sementara yang berjualan di media sosial luput

dari petugas pajak," jelasnya. Hal ini bisa mengakibatkan terjadinya *shifting* dari yang berjualan di *platform* resmi (Lazada, Bukalapak, dan sebagainya) ke *platform* media sosial Facebook, Instagram, dan sebagainya. Potensi pajak yang hilang nanti dikhawatirkan akan semakin besar.

Menurut Bhima, setelah belajar dari kebijakan-kebijakan perpajakan sebelumnya, salah satu kekurangan pemerintah adalah proses komunikasi terkadang belum *clear* sehingga menimbulkan spekulasi di kalangan pelaku usaha. "Asal komunikasi *clear*, saya yakin pengusaha bisnis *online* akan patuh," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap implementasi Paket Kebijakan Ekonomi ke-14. Diharapkan pelaku *e-commerce* bisa merasakan banyak kemudahan berusaha dari paket kebijakan tersebut, seperti pemotongan tarif pajak PPh bagi UMKM, memberikan pendampingan

dan pelatihan usaha bagi UMKM yang *go-online*, mempermudah perizinan usaha *startup e-commerce*, dan KUR khusus *startup e-commerce*.

Tantangan

Dalam merumuskan setiap kebijakan tentu akan menimbulkan banyak perspektif. Hal ini juga terjadi dalam perumusan peraturan pajak *e-commerce*. Kementerian Keuangan berupaya menampung aspirasi segala pihak dan memahami perspektif dari masing-masing kementerian yang terlibat serta dari sisi pelaku *e-commerce*. Perspektif dari Kementerian Perdagangan tentu berbeda dengan Kementerian Perindustrian. Kementerian Keuangan terus berupaya mengomunikasikan poin-poin yang akan diatur dalam peraturan tersebut, baik kepada kementerian lain maupun pada pelaku *e-commerce*.

Teks Pradany Hayyu

Pajak untuk *e-commerce*

Kemenkeu sedang menyusun RPKM tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*). Pertimbangannya yaitu untuk menjaga perlakuan yang setara antara perdagangan melalui sistem elektronik dan perdagangan konvensional. Selain itu, juga untuk mengatur perlakuan perpajakan bagi pelaku usaha perdagangan melalui *e-commerce*. Sehingga, para pelaku usaha dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan mudah sesuai model transaksi yang digunakan.

Pengguna Digital Indonesia



Total
Populasi
265.4 juta



Pengguna
Internet
132.7 juta



Pengguna
Aktif
media
sosial
130 juta

Sumber: We Are Social & hootsuite's Digital in 2017 Report

Nilai Transaksi *e-commerce* Per Kategori di Indonesia (dalam miliar)



Fashion &
Kecantikan
USD2.466



Elektronik
USD1.273



Makanan & Barang
Pribadi
USD593



Furnitur
USD1.288



Mainan & hobby
USD1.436



Travel & akomodasi
USD2.417



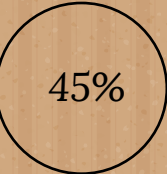
Musik Digital
USD0.004



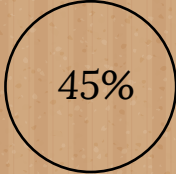
Video Games
USD0.792

Sumber: We Are Social & hootsuite's Digital in 2017 Report

Aktivitas *e-commerce* di Indonesia



Mencari
Produk/Jasa
secara online



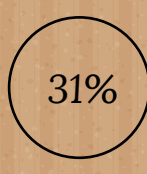
Mengunjungi
online retail



Membeli
barang online



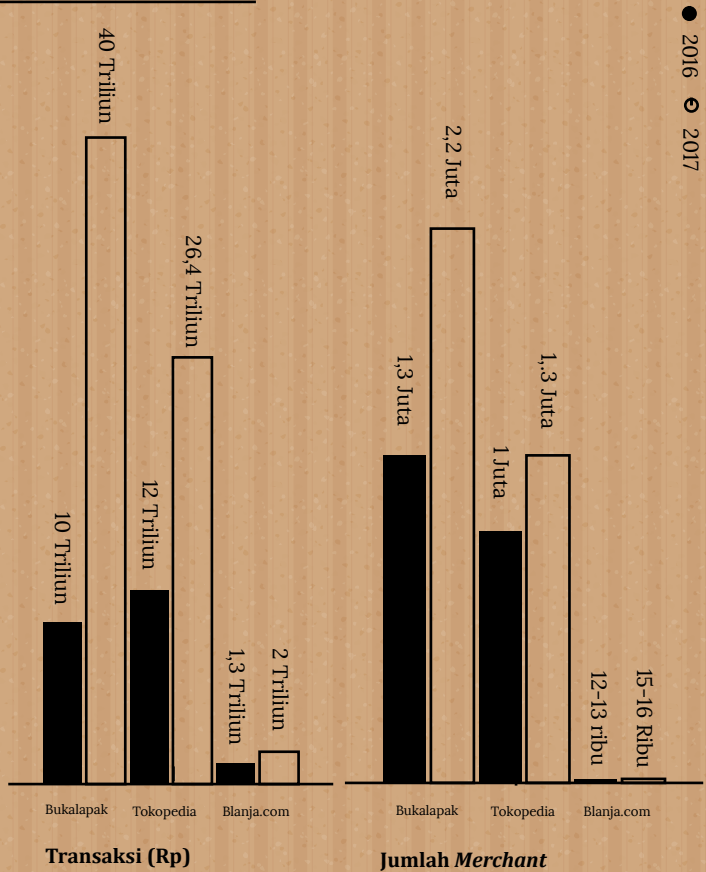
Membeli online
menggunakan
laptop/desktop



Membeli
online
menggunakan
gadget

Sumber: We Are Social &
hootsuite's Digital in 2017
Report, dalam 30 hari
terakhir

Nilai transaksi *Marketplace*



Sumber: Kemenperin & CITA

2 jenis pajak atas transaksi *e-commerce*

PPN

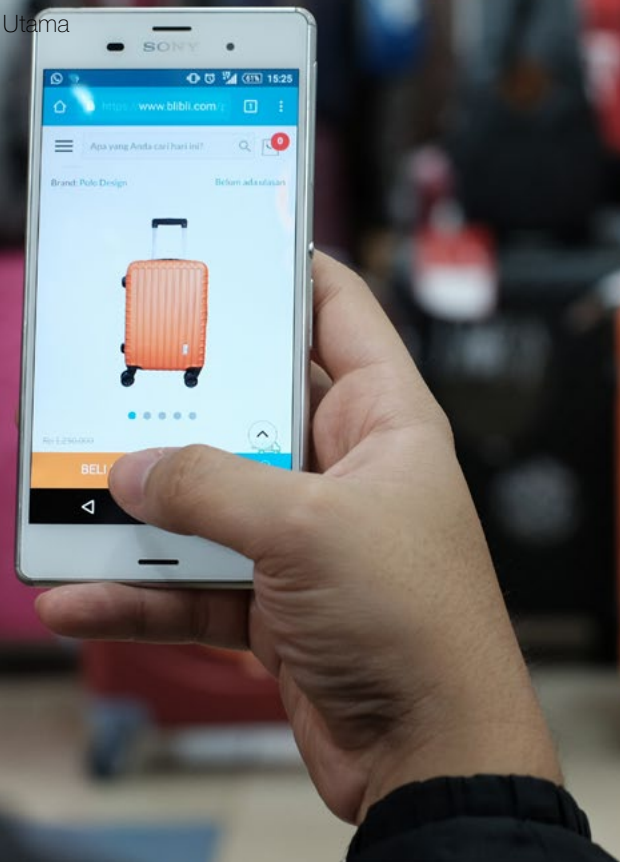
Pajak Pertambahan
Nilai

PPPh

Pajak Penghasilan

Skema Penerapan Pajak untuk *e-commerce*

1. Tidak ada perbedaan penerapan ketentuan perpajakan antara transaksi *e-commerce* dan konvensional;
2. Sektor UKM: Menggunakan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
3. Sektor non UKM: mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.



KEADILAN UNTUK SEMUA KALANGAN

Ekonomi digital menjadi salah satu penanda masuknya dunia dalam babak baru ekonomi. Para ekonom menyebutnya sebagai revolusi industri keempat. Di sini, peran pemerintah sebagai pembuat regulasi menjadi penting agar negara tidak hanya mampu bersaing di kancah dunia, namun juga mampu memitigasi segala tantangan yang muncul. Merespons hal itu, Presiden Jokowi pada tanggal 21 Juli 2017 telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) / *Road Map e-Commerce* Tahun 2017-2019.

Perpres tersebut dikeluarkan dengan menggunakan pertimbangan bahwa ekonomi berbasis elektronik mempunyai potensi ekonomi yang besar dan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Selain itu, perpres tersebut juga mengamankan bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan

potensi ekonomi berbasis elektronik, pemerintah perlu mendorong percepatan dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik (*e-commerce*), usaha pemula (*start-up*), pengembangan usaha, dan percepatan logistik.

Beberapa program yang menjadi tujuan dari perpres tersebut mencakup program pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan sumber daya manusia, infrastruktur komunikasi, logistik, keamanan siber, dan pembentukan manajemen pelaksana peta jalan SPNBE 2017-2019. Di satu sisi,

sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, pelayanan publik yang sama menjadi hak bagi setiap warga negara, namun di sisi lain setiap warga negara juga memiliki kewajiban yang sama untuk berpartisipasi membangun negara melalui pajak. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempunyai tugas berat mewujudkan keadilan ekonomi bagi semua warga negara melalui instrumen perpajakan.

Menanggapi peran tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa dalam menghadapi era ekonomi digital saat ini, masyarakat

perlu memaksimalkan semua kesempatan yang ada untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara. Untuk mendukung hal itu, negara akan selalu hadir sebagai pembuat kebijakan untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi semua kalangan.

“Kalau *opportunity* sebegitu besar, *the next* adalah *who can actually capitalize opportunity* itu. Di sini letak *public policy* di Indonesia. *That will heavily focusing on how we can create an equal opportunity*,” jelas Menkeu dalam Seminar Ekonomi Nasional dengan tema ‘Quo Vadis Ekonomi Digital Indonesia’ di Hotel Mulia, Jakarta pada tanggal 21 Februari 2018.

Menyamakan *level of playing field*

Sebagai pembuat regulasi di bidang fiskal, Kemenkeu merespons isu keadilan ekonomi dengan menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait perpajakan *e-commerce*. Menurut Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Rofyanto Kurniawan, memang saat ini harus diakui bahwa perdagangan melalui *e-commerce* telah mampu menjadikan model bisnis jauh lebih efisien dibandingkan dengan perdagangan konvensional.

Di sisi lain, data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menunjukkan adanya pergeseran pola belanja masyarakat yang beralih pada produk-produk *e-commerce*. Di sini, menurutnya, pemerintah perlu memberikan *equal treatment* atau perlakuan yang sama terhadap pelaku *e-commerce*. “Kalau pedagang yang punya toko di mal,

mereka bayar pajak, maka yang *e-commerce* juga harus kena pajak, sehingga mereka semua mendapat perlakuan yang sama di bidang perpajakannya sesuai aturan pajak yang berlaku,” jelas Roffy.

Terkait dengan jenis pajak untuk *e-commerce*, Direktur Peraturan Perpajakan II (PP II), Yunirwansyah, menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada jenis pajak baru. Dalam hal ini, penerapan pajak *e-commerce* hanya akan melaksanakan ketentuan dalam peraturan yang telah ada saat ini, yaitu Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh wajib pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

“Ketentuan UU PPh dan UU PPN sebenarnya saat ini sudah cukup mengatur, namun karena adanya kekhususan dalam model transaksinya, maka tata cara pemungutan atau penyetoran pajaknya perlu untuk diatur agar memberikan kemudahan dan kesederhanaan administrasinya untuk seluruh model transaksi digital ekonomi,” jelasnya kepada Media Keuangan.

Mekanisme perpajakan

Terkait dengan tata cara pemungutan, Yustinus Prastowo, Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), menjelaskan bahwa

e-commerce atau perdagangan elektronik merujuk kepada jual beli melalui sistem elektronik, yaitu melalui jaringan internet, dan memungkinkan transaksi dilakukan lintas batas tanpa harus ada toko secara fisik serta tatap muka penjual dan pembeli. Hal tersebut dapat terjadi karena seluruh kegiatan bisnis dilakukan melalu sistem internet atau *online*. Menurutnnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri telah memetakan *e-commerce* di Indonesia ke dalam empat model bisnis yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013, yakni *Online Marketplace* (misalnya tokopedia.com), *Classified Ads* (misalnya tokobagus.com), *Daily Deals* (misalnya lakupon.com), dan *Online Retail* (misalnya lazada.com).

Lebih jauh, Yustinus menjelaskan pilihan skema perpajakan *e-commerce* yang bisa diterapkan oleh pemerintah. Untuk PPN, para pelaku *e-commerce* wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memungut PPN atas penyerahan barang dan/atau jasa apabila omset setahunnya melebihi Rp4,8 miliar. Pemanfaatan skema PPN final dengan tarif lebih rendah dari tarif normal dapat menjadi pertimbangan dalam menggali potensi penerimaan yang efektif dengan potensi jumlah yang cukup tinggi.

Senada dengan hal tersebut, Kepala PKPN, Roffy, juga menjelaskan bahwa rencana tarif PPh 0,5 persen akan diterapkan dalam bentuk *prepayment* atau kredit pajak, sehingga dapat dikreditkan terhadap SPT Tahunan

Perdagangan melalui *e-commerce* menjadikan model bisnis lebih efisien

Foto
Anas Nur
Huda

wajib pajak. Untuk tarif SPT-nya akan menyesuaikan dengan tarif pada UU PPh dan PP 46 Tahun 2013. Sementara itu, PPN hanya akan dikenakan kepada penjual dengan omset lebih dari Rp4,8 miliar.

“Jadi barang yang dibeli di *marketplace* itu kalau dibeli akan dikenakan PPh 0,5 persen, kemudian kalau PKP yang omsetnya di atas Rp4,8 miliar dikenakan PPN 10 persen. Tetapi kalau pedagang kecil hanya dikenakan PPh 0,5 persen sebagai bagian dari perpajakan keseluruhan. Kalau untuk pengusaha kecil yang sifatnya coba-coba, itu sudah final dengan PPh 0,5 persen,” ujar Roffy.

Menurutnya, dengan tarif yang kecil tersebut tidak akan menyebabkan penjual keluar dari *marketplace* dan pindah ke media sosial karena adanya *trust* atas penjaminan dari *marketplace* melalui *escrow account* atau rekening bersama. “Paling tidak secara garis besar *marketplace* mampu memenuhi kebutuhan serta ada perlindungan kepada pembelinya, dan juga ada mekanisme komplain dan sebagainya. Dengan begitu otomatis pajak 0,5 persen akan dapat mendukung peningkatan *compliance* dan tetap mendukung masyarakat untuk belanja di *marketplace*,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak (PKP) DJP, Yon Arsal, turut menjelaskan bahwa terkait tantangan dalam pengumpulan data, DJP akan melakukan upaya optimalisasi data internal sebagai basis data penerapan pajak *e-commerce*. Selain itu, DJP juga sedang berkoordinasi dengan seluruh instansi dan pihak terkait untuk bekerja sama dalam memperoleh basis data pelaku dan transaksi *e-commerce*, seperti Kementerian Koordinator Perekonomian selaku koordinator penanggung jawab Peta Jalan SPNBE, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perdagangan selaku pembuat regulasi terkait tata cara pemberian izin pelaku *e-commerce*, Bank Indonesia selaku pengawas sistem *National Payment Gateway* untuk transaksi *e-commerce*, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan terkait data dan informasi perbankan maupun jasa keuangan, serta asosiasi *e-commerce* di Indonesia atau perwakilan industri *e-commerce* lainnya.

Transaksi cross border

Sementara itu, pemerintah juga ingin memberikan perlindungan dan keadilan domestik yang tegas untuk transaksi yang berasal dari luar negeri, atau biasa disebut dengan transaksi *cross border*. Di sini, peran

Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menjadi sangat penting. Menurut Djanurindro Wibowo, Kepala Subdirektorat Impor DJBC, transaksi *cross border* saat ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni untuk barang berwujud (*tangible goods*) dan barang tidak berwujud/barang digital (*digital goods*).

Lebih jauh, Djanur menjelaskan bahwa mekanisme pengiriman barang impor atas transaksi *e-commerce* berwujud saat ini terdiri dari dua kemungkinan skema. Pertama, skema melalui impor barang kiriman yang diatur pemungutan Bea Masuknya dengan PMK Nomor 182 Tahun 2016 melalui Perusahaan Jasa Titipan atau penyelenggara pos yang ditunjuk. Yang kedua adalah melalui impor dengan pemberitahuan umum melalui Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan menggunakan jasa kargo udara maupun kargo laut dalam bentuk konsolidasi.

Sementara itu, transaksi *cross border* untuk barang digital juga menjadi tantangan tersendiri bagi Kemenkeu, terutama untuk barang digital yang bersifat over the top (OTT). Menurutnya, jenis-jenis barang digital yang masuk dalam kategori transaksi *cross border* mencakup semua jenis data digital yang dapat ditransmisikan baik berupa piranti lunak, multimedia termasuk film dan musik, data berupa siaran televisi, data penggerak permesinan, desain, *big data* yang dilakukan penyimpanan dengan *storage cloud*, maupun sosial media baik dengan cara dikirim atau dialirkan (*streaming*). “Tantangan pihak bea cukai di seluruh dunia adalah memastikan bahwa perdagangan memperoleh perlakuan yang adil, *level playing field* yang sama, antara perdagangan

konservatif yang membayar pajak dan cara digital yang dapat ditransmisikan,” jelasnya.

Satu pandangan dengan DJBC, Rubino Sugana, *Lead Revenue Adviser of Australia Indonesia Partnership for Economic Governance* (AIPEG), menjelaskan bahwa permasalahan *e-commerce* untuk produk digital lintas negara menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh negara di dunia. “Sebenarnya impor jasa atau barang digital pun harusnya bayar PPh dan PPN, tetapi memang lebih susah. Akan tetapi, perusahaan besar seperti Netflix, Google, Facebook, Twitter ini kan *public company*. Mereka sangat *concern* terhadap reputasinya. Jadi kalau kita punya aturan yang jelas bahwa semua jasa ini kena pajak, mereka kemungkinan besar akan patuh,” jelasnya.

Di sisi lain, Direktur PP II, Yunirwansyah, juga menjelaskan bahwa saat ini sudah banyak negara lain yang menerapkan pajak *e-commerce* dan mampu memperoleh hasil yang signifikan. Ia mencontohkan India, misalnya, mengambil langkah unilateral dengan mengenakan *Equalization Levy* (EQL) atas transaksi digital ekonomi mulai 1 Februari 2016, sedangkan Inggris mulai 1 April 2015 telah menerapkan *Diverted Profit Tax* (DPT) dengan tarif 25 persen atas laba usaha yang dialihkan ke luar negeri. Sementara itu, Australia menerapkan *Multinational Anti-Avoidance Law* (MAAL) secara efektif pada 1 Januari 2016 dengan tarif 40 persen dari *diverted profit*, serta Jepang melakukan perubahan UU Pajak Konsumsi untuk mengatur pajak konsumsi atas jasa *e-commerce* dengan tarif 8 persen dari nilai transaksi.

Teks Abdul Aziz



MEKANISME PERPAJAKAN E-COMMERCE

Kehadiran teknologi telah mengubah gaya hidup masyarakat. Banyak kemudahan dan peluang yang ditawarkan mulai dari komunikasi tak terbatas hingga kegiatan ekonomi. Tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi membuat ekonomi berbasis digital semakin ramai peminat. Pertumbuhan ini juga didorong oleh populasi muda yang akrab dengan teknologi.

Kegiatan perdagangan elektronik atau *e-commerce* yang terus berubah dan semakin maju ini perlu respon

Transaksi *e-commerce* tidak mengenal batas wilayah.

Foto Anas Nur Huda



pemerintah yang gesit, termasuk dari sisi perpajakan. Hal ini menjadi menantang, sebab sifat transaksinya yang unik. Berbeda dengan transaksi konvensional, transaksi *e-commerce* tidak mengenal batas wilayah, tidak selalu berupa barang, serta tidak ada persyaratan khusus.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara mengatakan pemerintah tidak berencana untuk memunculkan jenis pajak baru terhadap pelaku *e-commerce*. Namun, melihat metode baru dalam kegiatan ekonomi secara elektronik, maka perlu dibuat tata cara pemungutan pajaknya. “Dengan begitu, *e-commerce* bisa bilang bahwa mereka sudah memenuhi apa yang harus saya tunaikan kepada negara,” kata Suahasil.

Dijelaskan Suahasil lebih lanjut, pemerintah juga berkonsultasi dengan pelaku *e-commerce*. Menurutny, secara umum pelaku usaha menyatakan mereka siap membantu pemerintah. Ada dua hal yang menjadi perhatian *e-commerce*. Pertama, penyedia *platform* perlu diberikan waktu yang cukup untuk menyiapkan sistem penyetoran pajak atau pemberian NPWP virtual terjadap pedagang *e-commerce* jika dibutuhkan.

Kedua, pelaku *e-commerce* juga menginginkan agar kewajiban penyetoran pajak yang terutang berlaku untuk semua penyedia model *platform* yaitu *marketplace*, media sosial, iklan baris, dan lain-lain. “Tentu mereka juga ingin memastikan agar tata cara pemungutan pajaknya jangan sampai membuat bisnisnya terganggu,” jelas Suahasil.

Ketua Umum Asosiasi *e-Commerce* Indonesia (idEA), Aulia Marinto mengatakan, pihaknya belum bisa memperkirakan bagaimana kebijakan baru tersebut nantinya akan mempengaruhi bisnis *e-commerce*, sebab hingga saat ini mekanisme pemungutan pajak terutang *e-commerce* masih dalam perumusan. “Agak sulit melihat

bagaimana dampaknya terhadap harga jual barang dalam konteks *item per item*. Apalagi kami belum tahu seperti apa tata caranya,” kata Aulia.

Aulia mengaku khawatir dengan rencana penugasan untuk menjadi agen penyetor pajak. Menurutny, *marketplace* yang ada di Indonesia saat ini ada yang sudah besar adapula yang masih kecil. Untuk menjadi agen penyetor berarti ada pekerjaan operasional tambahan yang harus disiapkan. “Belum apa-apa sudah harus ada pekerjaan tambahan. Bisnisnya *aja* belum kukuh. Bayangkan kalo yang melaksanakan *marketplace start up* yang baru memulai usahanya. Harusnya dia fokus pada pertumbuhan tetapi sudah harus melaksanakan tugas negara,” kata Aulia.

Aulia menambahkan, banyak usaha kecil dan menengah (UKM) yang berada di beberapa *marketplace* serta memiliki toko *offline* di beberapa tempat. “Bagaimana cara kita mencari jejaknya?” tanya Aulia. Di samping itu, perdagangan di media sosial juga belum terjangkau pajak. Akibatnya, dikhawatirkan UKM yang saat ini menjadi *merchant* di *marketplace* yg bisa pindah ke media sosial. “Hal ini bisa merugikan

padahal untuk mengajak orang-orang ini untuk membuka usaha di *marketplace* sudah mengeluarkan dana miliaran,” tukasnya.

Suahasil menjelaskan, peraturan baru ini nantinya memang akan banyak berbicara mengenai *marketplace*. Namun bukan berarti tidak ada perlakuan yang sama untuk *platform* lain. “Saat ini ada salah tangkap. Semua jenis transaksi memiliki kewajiban pajak. Hanya saja untuk sosial media dan iklan baris tidak melewati pihak lain. Sementara khusus untuk *marketplace* kami minta bantuan karena transaksinya melewati *marketplace*. Kalau data antara *e-commerce* dan DJP sudah terkoneksi seperti di Australia, maka prosesnya akan lebih cepat” kata Suahasil.

Meski pedagang bisa saja berjualan di berbagai tempat sekaligus, namun untuk melihat apakah pembukuannya sudah memenuhi syarat perpajakan, salah satunya bisa dilihat dari kegiatan *marketplace*. “Ini bukan tentang mengejar penerimaan, tetapi tentang perlakuan yang sama baik bagi *e-commerce* maupun perdagangan konvensional,” tutup Suahasil.

Teks Irma Kesuma Dewi

TIDAK ADA JENIS PAJAK BARU

Perumusan aturan pajak untuk *e-commerce* kini tengah dimatangkan. Filosofi kebijakan ini tak lain untuk menerapkan keadilan perpajakan bagi seluruh pelaku usaha, baik konvensional maupun digital. Untuk mengetahui perkembangan terbaru peraturan pajak *e-commerce*, simak wawancara Media Keuangan dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara, berikut ini.

Pemerintah berencana menerapkan pajak untuk *e-commerce*. Apa latar belakang kebijakan tersebut?

Pada dasarnya, pemerintah tidak memunculkan jenis pajak baru terhadap pelaku *e-commerce*. Pemerintah akan menerbitkan aturan terkait tata cara pemungutan pajak yang terutang di industri *e-commerce*.

Kepala Badan kebijakan Fiskal

Foto Dimach Putra

Latar belakangnya yaitu saat ini telah muncul suatu pola baru dalam perdagangan barang dan jasa dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang kita kenal sebagai *e-commerce*. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, penjualan secara konvensional ataupun melalui *e-commerce* sama-sama terutang pajak (PPH dan PPN), tidak ada perbedaan.

Pemerintah hanya perlu memastikan bahwa pajak yang terutang melalui transaksi konvensional dan pajak yang terutang melalui transaksi *e-commerce* telah dipungut sesuai aturan yang berlaku. Pedagang yang penjualan secara konvensional ataupun melalui *e-commerce* sama-sama telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan konsumen yang berbelanja melalui pedagang konvensional ataupun pedagang *e-commerce* dikenakan beban yang sama.

Berapa perkiraan potensi penerimaan negara dari pajak e-commerce?

Kebijakan ini bukan semata tentang meningkatkan penerimaan pajak. Ini lebih kepada bagaimana pemerintah membangun sistem untuk proses bisnis *e-commerce* sehingga menciptakan *level playing field* (kesetaraan perlakuan kepada pelaku usaha). Pemerintah memastikan semua pelaku bisnis harus taat pajak. Bagaimana bisa taat pajak kalau peraturannya tidak ada. Penerapan *level plyaing field* ini jauh lebih besar esensinya. Jadi bukannya pemerintah yang mengejar penerimaan.

Dalam pemberitaan di media, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pendataan perusahaan e-commerce sejak Januari lalu. Bagaimana koordinasi yang dilakukan Kementerian Keuangan dengan BPS terkait pengumpulan data tersebut?

Fokus Kementerian Keuangan saat ini adalah untuk menciptakan keadilan bagi dunia perdagangan konvensional dan *e-commerce*, sehingga konsumen yang

belanja melalui *e-commerce* dan konvensional dikenai beban yang sama, serta pedagang yang penjualan melalui *e-commerce* ataupun pihak *platform* penyelenggara *e-commerce* dapat menunaikan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Data BPS dapat menjadi masukan bagi Kementerian Keuangan khususnya dalam membantu pihak *platform* penyelenggara *e-commerce* untuk menunaikan kewajiban perpajakannya.

Bagaimana komunikasi yang dilakukan Kementerian Keuangan dengan perusahaan e-commerce?

Kementerian Keuangan melalui BKF sudah berkoordinasi dengan Asosiasi *E-commerce* Indonesia (idEA – Indonesian *E-commerce* Association) selaku perwakilan dari para pelaku usaha *e-commerce*. idEA menyatakan siap untuk melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan apabila telah diterbitkan. Masukan-masukan dari berbagai pihak termasuk idEA sudah menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan peraturan pajak *e-commerce*.

Bagaimana BKF Bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyusun besaran tarif pajak e-commerce?

BKF selalu berkoordinasi dengan DJP dalam mengeluarkan kebijakan di bidang perpajakan. Tidak ada perbedaan tarif pajak yang

dikenakan atas transaksi melalui *e-commerce* dengan transaksi melalui cara konvensional. Pemerintah hanya menginginkan pedagang yang penjualan melalui *e-commerce* menyetorkan sebagian kecil pajak yang terutang dari transaksi tersebut (PPN 0,5% dan PPh 1%) sebagai *pre payment* melalui pihak *platform* penyelenggara *e-commerce*.

Bagaimana perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) terkait pajak e-commerce?

Dalam penyusunan RPMK terkait tata cara penyetoran pajak *e-commerce*, BKF telah berkoordinasi secara internal, yaitu dengan DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kemudian juga berkoordinasi dengan pihak eksternal, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. BKF juga telah melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak Asosiasi *E-commerce* Indonesia (idEA). Saat ini masih ada beberapa hal yang perlu dimatangkan, khususnya terkait teknis perhitungan pajak transaksi *e-commerce*.

Teks Pradany Hayyu



Ke Bandara Lebih Mudah Dengan Kereta

Setelah bertahun-tahun berangan, akhirnya Soekarno Hatta memiliki Kereta Api (KA) Bandara. Kabar ini tentu menggembirakan. Impian warga ibukota untuk menuju bandara tanpa bermacam-macetan kini terwujud. Kali ini Media Keuangan berkesempatan mendengarkan ceritanya secara langsung dari Heru Kuswanto, Direktur PT Railink selaku pengelola kereta yang beroperasi dari Stasiun Sudirman Baru ke dan dari Stasiun Bandara Soekarno-Hatta.

Ketika konsep kereta bandara disiapkan, gagasan apa yang menjadi latar belakang?

Jadi begini, Railink adalah lembaga bisnis yang harus untung. Sebab itu, semua proyek yang kita rancang harus layak. Baik secara hukum, lingkungan, ekonomi, maupun keuangan. Meski menyangkut pengembangan infrastruktur

Railink menjadi alternatif transportasi baru.

Foto Anas Nur Huda



Saya pikir, faktor kenyamanan memang penting, apalagi dalam konteks kelas premium seperti kami. Bukan hanya keretanya, tetapi stasiunnya juga dirancang untuk kenyamanan. Konsep kami adalah elegan, abadi, dan berteknologi tinggi. Semua layanan tersedia secara digital. Kami juga menyediakan wi-fi dengan kecepatan tinggi.

Heru Kuswanto
Direktur Railink

perkeretaapian, pengembangan KA Bandara ini tidak menggunakan dana APBN karena pendekatannya murni bisnis ke bisnis.

Kami masuk ke sini tentunya dengan melihat peluang bisnis yang bagus dengan mempertimbangkan pergerakan penumpang pesawat di bandara terbesar di Indonesia. Saat ini, penumpang pesawat di Bandara Soekarno Hatta sudah mencapai 65 juta per tahun. Saya pikir ukuran pasarnya cukup bagus.

Kemudian, kalau berbicara tentang akses ke bandara di Jakarta, selama ini kami melihat transportasi publik yang tersedia selalu berbasis jalan raya seperti bus atau taksi. Padahal, bisa kita lihat saat ini kemacetan lalu lintas selalu meningkat. Kami melihat peluang itu, dengan menawarkan transportasi berbasis rel yang lebih cepat.

Apa perbedaan mendasar antara KA Bandara Jakarta dan Kualanamu?

Sebenarnya dari sisi layanan tidak ada perbedaan, *wong* satu konsep *kan*. Kami bermain di kelas premium sehingga semua sumber daya dan usaha kami memang arahnya untuk mendukung kebutuhan itu. Kami mempertahankan ketepatan waktu yang tinggi. Saat ini tingkat ketepatan waktu KA Bandara masih bertahan di angka 99,7 persen, melebihi ketepatan waktu moda transportasi yang lain.

Coba kita bandingkan dengan penerbangan, *hayooo*, tidak boleh sebut merek *lho*. Kita tahu sendiri *kan* kondisinya. Memang keterlambatan penerbangan disebabkan oleh banyak faktor. Kendala bisa jadi ada pada maskapainya, bisa juga pada pihak bandaranya. Untuk KA Bandara Jakarta, ketepatan waktu kita sudah sangat bagus. Apalagi kita masih harus berbagi jalur dengan Kereta Rel Listrik (KRL).

Selain itu, waktu tempuh juga menjadi hal penting. Di KA Bandara Medan selama 4 tahun beroperasi waktu tempuh dari kota ke bandara adalah 30 menit dan dari bandara ke kota 45 menit. Hal ini dikarenakan di sana masih menggunakan satu jalur. Tahun ini, kami sudah menggunakan dua jalur sehingga waktu tempuh dari bandara ke kota dan sebaliknya sudah sama. Rencananya, kami akan berupaya mengurangi waktu tempuh lebih singkat menjadi 20-25 menit.

Di Jakarta juga sama. Kemarin saat uji coba waktu tempuh ke bandara Soekarno-Hatta masih 55 menit. Bulan Maret nanti akan kami giring menjadi 38 menit saja. Tahun depan kalau jalan pintas antara Tanah Abang-Grogol sudah selesai dibangun, waktu tempuh bisa menjadi 30 menit.

Seperti apa profil penumpang KA Bandara?

Pengalaman kami hampir sama dengan negara-negara tetangga. Pengguna KA Bandara di Medan sebagian

besar adalah pelancong bisnis seperti karyawan swasta dan pegawai negeri. Jumlahnya sekitar 85 persen. Sementara sisanya adalah keluarga.

Saat KA Bandara Soekarno Hatta baru diluncurkan, memang antusiasme warga dengan beragam profil untuk mencoba sangat besar. Tetapi hal ini tidak bisa dijadikan patokan, namanya juga masih baru sehingga masih ada euforia. Nanti kita lihat lagi dalam 5-10 tahun ke depan.

Selain waktu tempuh, apalagi keistimewaan KA Bandara?

Saya pikir, faktor kenyamanan memang penting, apalagi dalam konteks kelas premium seperti kami. Bukan hanya keretanya, tetapi stasiunnya juga dirancang untuk kenyamanan. Konsep kami adalah elegan, abadi, dan berteknologi tinggi. Semua layanan tersedia secara digital. Kami juga menyediakan *wi-fi* dengan kecepatan tinggi. Stasiun kami dirancang dengan konsep terbuka. Akan ada banyak penyewa kios untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

KA Bandara sendiri berbeda dengan KA Commuter line dari sisi penyediaan ruang untuk bagasi. KA Commuter Line dirancang untuk memuat penumpang berdiri sebanyak-banyaknya sehingga sulit membawa barang besar. Sementara di KA Bandara semua penumpang harus duduk.

Namun di sisi lain, kalau kita berbicara kenyamanan, semua penyedia layanan angkutan umum juga pasti akan menghadirkan kenyamanan. Apapun operatornya, kenyamanan adalah sesuatu yang generik dan menjadi keharusan. Jadi, menurut saya keistimewaan spesifik KA bandara memang pada waktu tempuh.

Saat ini, ketika kita naik angkutan umum berbasis jalan raya, deviasi celah antara jarak waktu tempuh sulit diperhitungkan. Kalau jalanan sedang lancar mungkin kita bisa menuju bandara



dalam waktu 1 jam. Tetapi kalau sedang macet bisa lebih dari 2 jam. Ada celah 1 jam yang artinya sudah satu waktu tempuh kereta sendiri.

Kalau KA Bandara terlambat, paling-paling hanya 5 menit. Tapi data yang saya miliki saat ini menunjukkan ketepatan waktu tempuh kami masih 99,9 persen. Artinya kecil sekali kemungkinan terlambat sehingga penumpang tidak perlu terlalu khawatir. Ketika kita bepergian ke bandara pasti juga punya tiket pesawat. Sebab itu, pertimbangan waktu tempuh menjadi keistimewaan. Pembelian tiket juga tanpa petugas. Kami tidak punya loket. Semua orang diarahkan ke pembelian daring. Tetapi kalau memang terpaksa harus beli tiket di tempat, kami sudah menyediakan mesin penjual otomatis.

Bagaimana Railink menerapkan teknologi dalam pembelian tiket?

Sistem pembelian tiket yang kami bangun juga unik. Kami mengembangkan sistem sendiri bernama Airport Railway Ticketing System (ARTS). Nilai utama dari ARTS saat ini adalah transaksi non tunai. Mungkin saat ini operator transportasi yang berani menerapkan transaksi non

tunai 100 persen baru Railink.

Kadang ada pertanyaan bagaimana kalau calon penumpang tidak punya kartu elektronik? Saya balik pertanyaannya, kalau orang sudah berminat naik pesawat, di zaman sekarang ini, mana ada orang yang tidak punya kartu elektronik. *Kan* bisa kartu debit, kartu kredit, atau macam-macam kartu pra bayar.

Tetapi, kalau memang ada orang yang tidak memiliki kartu, kami sudah menyediakan kartu pra bayar dari beragam bank. Diantaranya e-Money dari Bank Mandiri, Brizzi dari BRI, dan Flazz dari BCA. Jadi transaksinya harus tetap non tunai tetapi caranya kami bantu.

Selain itu, kami menerapkan konsep bisa diakses dari mana saja. Orang datang ke stasiun tinggal menikmati hidup saja. Bersantai sambil ngopi sambil menunggu kereta berangkat. Beli tiketnya bisa dari kantor atau dari rumah secara daring. Bisa dari situs web Railink atau dari aplikasi mobile.

Seperti apa pola perubahan gaya bertransportasi yang diharapkan?

Kalau daya saing KA Bandara sudah bagus, dengan sendirinya akan menarik orang. Kalau sudah tertarik, dia akan

mengikuti tren yang sudah kita atur yakni beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Selain itu, penumpang bisa jadi lebih berencana. Dia bisa merancang mau naik kereta jam berapa dengan perkiraan waktu terbang pesawat yang sudah dipesan. Selain itu urusan antar-mengantar juga tidak diperlukan lagi. Kami akan tingkatkan integrasi dengan moda transportasi lain, termasuk taksi argo dan taksi daring.

Contohnya di Medan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengelolaan taksi di sana *enggak bener* dan area kami juga terbatas. Akhirnya saya kasih titik penjemputan khusus taksi daring. Dulunya penumpang kami begitu turun dari KA Bandara untuk menuju rumah atau penginapan harus berjabaku dengan tawar menawar taksi yang sistemnya tidak rapi. Akhirnya saya menawarkan kerjasama dengan taksi berargo meter. Di Jakarta juga sama. Sementara ini saya sudah masukkan taksi resmi berargo meter. Sebentar lagi saya akan siapkan kerjasama dengan ojek dan taksi daring.

Teks Irma Kesuma

KPPBC Tipe Madya Pabean
Tanjung Perak, Surabaya

Kesetaraan Gender Menjadi Poin Penting



Pada masa Hindia Belanda, Jembatan Merah yang melewati sungai Kali Mas di Surabaya merupakan pusat perdagangan yang potensial. Kemudian pada tahun 1910, pembangunan pelabuhan Tanjung Perak mulai dilaksanakan demi memfasilitasi lalu lintas perdagangan dan pergerakan manusia. Pelabuhan Tanjung Perak tidak hanya berkontribusi besar bagi perdagangan di Jawa Timur, namun juga bagi seluruh kawasan timur Indonesia. Maka dari itu diperlukan instansi pengawas perdagangan, yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) Tanjung Perak.

KPPBC TMP Tanjung Perak merupakan salah satu dari unit kerja vertikal di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan RI. Kantor yang berlokasi di Jalan Perak Timur Nomor 498 Kota Surabaya ini terkenal dengan berbagai prestasi yang telah diraih. Untuk meningkatkan kinerja seluruh jajaran pegawai, KPPBC TMP Tanjung Perak merumuskan motto BC PERAK PAHLAWAN. BC PERAK PAHLAWAN memiliki arti Bea Cukai Tanjung Perak melakukan perubahan terarah dan konsisten, serta pantang menyerah dalam pelayanan dan pengawasan.

Salah satu capaian KPPBC TMP Tanjung Perak yang membanggakan yaitu penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai melebihi target yang ditetapkan yaitu 101,69 persen. Selain itu, sebuah prestasi membanggakan juga pertama kali diraih Kantor KPPBC TMP Tanjung Perak yakni capaian Juara I dalam Lomba Kantor Pengimplementasian Pengarusutamaan Gender (PUG) tahun 2017 dan Juara I Kantor Pelayanan Terbaik tahun 2017 di tingkat Kementerian Keuangan. Kedua ajang perlombaan tersebut diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Oeang Ke-71 Tahun 2017.

Perjalanan PUG

Pengarusutamaan Gender (PUG) pada dasarnya telah diimplementasikan oleh KPPBC TMP Tanjung Perak sejak lama. Namun tim kerja PUG baru disusun pada

Apel pagi
KPPBC TMP
Tanjung Perak.

Kegiatan
Outbound para
pegawai.

Penandatanganan
Pakta
Integritas.

Seminar
Pengenalan
Customs
Center

Foto
Dok. KPPBC
TMP Tanjung
Perak

8 Maret 2016 yang diketuai oleh Lenni Ika Wahyudiasti (kala itu menjabat sebagai Kepala Subbagian Umum).

Implementasi program yang telah diupayakan KPPBC TMP Tanjung Perak antara lain pengadaan tempat parkir khusus wanita, pengadaan ruang ramah anak (*daycare room*), pengadaan ruang laktasi (ruang menyusui) untuk mendukung ibu menjalankan ASI Eksklusif, mengadakan seminar tentang pengasuhan anak, serta penyajian data terpilah dan *gender statistic* untuk melakukan analisis gender.

Pada bulan Maret 2017, KPPBC TMP Tanjung Perak ditunjuk mewakili Direktorat Jendral Bea Cukai dalam Lomba Implementasi PUG Tingkat Satker Vertikal Lingkup Kementerian Keuangan Tahun 2017. Demi mengoptimalkan implementasi nyata pengarusutamaan gender, KPPBC TMP Tanjung Perak mempunyai semboyan “Kesetaraan Gender untuk Kesempurnaan Pengabdian”.

Selain fasilitas pendukung PUG yang telah dimiliki oleh KPPBC TMP Tanjung Perak di atas, beberapa pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana juga perlu dilakukan. Sarana dan prasarana dimaksud antara lain penggantian area parkir khusus wanita menjadi area parkir prioritas (ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas), pengadaan akses khusus penyandang disabilitas, pengadaan *Priority Lounge* (Ruang Tunggu Prioritas), pengadaan toilet khusus untuk penyandang disabilitas, pengadaan *Priority Health Care*, dan pengadaan Pojok Info dan Kreativitas (PINTAS)

Selain sarana prasarana pendukung tersebut, KPPBC TMP Tanjung Perak juga mengeluarkan kebijakan responsif gender sebagai komitmen mendukung PUG. Kebijakan dimaksud antara lain usulan piket bulanan terkait pelayanan kepabeanan dan cukai 24/7 dengan pertimbangan beban kerja dan risiko, dukungan penuh terhadap pelaksanaan

program ASI Eksklusif melalui ruang ramah anak (*daycare room*) dan ruang laktasi, serta kesempatan yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan untuk berperan aktif dalam berbagai tim kerja dan kegiatan di kantor.

Target dan Tantangan

Pada tahun 2018, di bawah arahan kepala kantor Basuki Suryanto, KPPBC TMP Tanjung Perak mencanangkan berbagai target. Pertama, mewujudkan pencapaian kinerja (IKU) yang diamanahkan oleh pimpinan demi tercapainya Nilai Kerja Organisasi tahun 2018. Kedua, mempertahankan dan meningkatkan sistem pelayanan, pengawasan, manajemen risiko, serta sistem pendukung (*supporting system*). Ketiga, mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) dan pendapat pengakuan sebagai Kantor Berpredikat ZI WBK dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Di samping itu, KPPBC TMP Tanjung Perak juga konsisten meningkatkan kualitas pelayanan dan terus mempertahankan ISO 9000:2015 dalam menjamin mutu layanan yang telah diperoleh sejak November 2016,” tegas Basuki. Kemudian, layanan yang maksimal juga perlu dievaluasi melalui survei kepuasan pengguna jasa untuk mengetahui *feedback* dari *stakeholder*.

Keberhasilan KPPBC TMP Tanjung Perak dalam menjalankan visinya sebagai kantor bea cukai yang terdepan, berintegritas, berkualitas, dan inovatif tentu tak lepas dari tantangan. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia, wilayah pengawasan jumlah sumber daya manusia dan sarana prasarana, karakteristik pengguna jasa yang heterogen, ketaatan akan peraturan karena importir berisiko tinggi masih rendah, dan sebagainya.

Segala tantangan tersebut berusaha diatasi dengan manajemen sumber daya



manusia yang optimal dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan dan pengawasan. Di bidang teknologi informasi, KPPBC TMP Tanjung Perak telah menerapkan mekanisme pertukaran data elektronik, baik di lingkup internal maupun untuk terhubung dengan pengguna jasa maupun kawasan pabean yang masih berada di bawah pengawasan KPPBC TMP Tanjung Perak. Tiga jenis aplikasi pertukaran data yang digunakan yaitu INSW (*Indonesan National Single Window*), CEISA (*Customs-Excise Information System and Automation*), dan SIPINTER (Sistem Pelayanan dan Informasi Terpadu). Diharapkan pemanfaatan teknologi informasi yang mumpuni ini mendukung KPPBC TMP Bea Cukai mendukung komitmen “Bea Cukai Makin Baik.”

Teks Yani Oktaviani



Foto
Andi Al Hakim

Pendidikan Kunci Kehidupan

Sebagai lulusan dengan nilai akademis di atas rata-rata, pemuda itu datang memenuhi undangan wawancara penerimaan calon pegawai negeri di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tak tanggung-tanggung, kala itu ia diwawancara langsung oleh pejabat eselon dua Kemenkeu. Namun, yang membedakan dirinya dengan pelamar umum lainnya adalah ia mengikuti seleksi pegawai tersebut bukan karena ia sengaja melamar menjadi pegawai negeri sipil. Ia dikirim oleh pihak kampusnya untuk memenuhi undangan penerimaan formasi pegawai di Kemenkeu. Memang saat itu Kemenkeu sedang melaksanakan *talent scouting* dengan mengundang lulusan dari seluruh universitas dalam negeri agar dapat kesempatan mengabdikan kepada negara. Ia pun terpilih sebagai salah satu lulusan yang diterima kala itu. Sosok pemuda sukses itu ialah Encep Sudarwan, Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu.

Sejak masuk melalui penerimaan jalur khusus pegawai negeri, Encep berkomitmen untuk mengabdikan kepada bangsa dan negaranya. Sembari

mengabdikan, ia pun tak pernah lupa pesan orang tuanya agar tak berhenti untuk selalu belajar melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan pesan tersebut, ia pun berhasil memperoleh beasiswa ke luar negeri. Tak tanggung-tanggung, ia menuntaskan pendidikan master bidang ekonominya di Claremont Graduate School di Amerika Serikat.

“Masuk Kementerian Keuangan karena ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri. Itu jadi salah satu motivasi saya waktu itu. Padahal saat itu banyak tawaran kerja di perbankan yang menjadi pekerjaan favorit yang sedang *booming* waktu itu,” kenangnya.

Berbagai tantangan baru

Pertama kali bekerja di Kemenkeu, Encep langsung ditempatkan di posisi strategis di Biro Piutang Negara Perbankan, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, yang menjadi cikal bakal berdirinya DJKN. Hari pertama bekerja, ia langsung ditugaskan untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan yang sedang melakukan restrukturisasi utang. Saat itu, hanya dirinya yang merupakan lulusan sarjana ekonomi di bagiannya, sehingga ia menjadi orang pertama

yang dianggap mampu membaca dan menganalisa laporan keuangan. Sekembalinya dari sekolah di Amerika Serikat tahun 1998, ia pun menghadapi tantangan dalam pekerjaan yang semakin berat. Tak lama bekerja, ia pun dipromosikan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KPPLN) Batam. Menariknya, ia harus membangun dan menyiapkan seluruh sarana dan prasana kantor dari awal. Sebab, kantornya merupakan kantor yang baru dibuka di wilayah Batam. Bahkan agar pelayanan kepada masyarakat segera berjalan, ia sempat menjadikan rumah kontrakkannya sebagai kantor sementara. Ia pun juga terus memotivasi dan membina para pegawai barunya agar bisa segera beradaptasi di Batam. Ia juga melakukan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setempat dalam rangka menyewa rumah susun untuk para pegawainya yang mayoritas berasal dari luar Batam. Karena lebih dari lima tahun ia memimpin kantor di KPPLN di Batam, ia pun sempat mendapat predikat kepala kantor terlama di wilayah Batam.

Inovasi yang terukur

Setelah lima tahun di Batam, ia pun dipercaya untuk memimpin Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V. Di sini, ia mendapat tantangan besar untuk menyelesaikan masalah piutang dan kekayaan negara dari eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), serta Inventarisasi dan Penilaian (IP) dari aset Barang Milik Negara (BMN) di seluruh wilayah Jakarta V. Setelah empat tahun mengabdikan di KPKNL Jakarta V, menjadi Kasubdit di Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI), kemudian Encep pun dipromosikan sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung yang berpusat

di Palembang. Hampir Sembilan bulan kemudian, akhirnya ia pun kembali ke Jakarta untuk memimpin Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI). Di tempat ini, Encep berhasil melakukan inovasi di bidang lelang. Ia bersama dengan Direktur Lelang menginisiasi reformasi dan modernisasi sistem lelang dengan membuat aplikasi *e-Auction*. “Ini sangat mengubah dunia lelang dengan *e-Auction*. Jadi kan lelang semakin terbuka, di mana saja orang bisa ikut lelang. Hal itu bisa mengurangi hal-hal yang tidak baik di bidang lelang,” ujarnya.

Dalam bekerja, Encep selalu berpegang teguh pada prinsipnya. Ia selalu berkomitmen untuk dapat memberikan sesuatu yang baru di tempat barunya. Selain berinovasi, ia juga mementingkan prinsip terukur. “Kalau saya ditugasi, pokoknya harus ada hal baru, yang lebih baik, dan harus terukur. Di Jakarta itu laporan ranking ke-satu terus. Kanwil Jakarta itu selalu paling cepat,” jelasnya.

Terakhir, Encep ditugaskan untuk memimpin Direktorat Barang Milik Negara DJKN. Di tempat sekarang, ia diberikan tugas ambisius oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan revaluasi seluruh kekayaan negara secara nasional setelah 10 tahun revaluasi terakhir dilakukan. Hal itu dilakukan agar pencatatan kekayaan negara dapat diukur sesuai dengan nilai yang wajar saat ini. Untuk menyukkseskan hal tersebut, ia mengutamakan sinergi dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga (K/L) dan didukung teknologi dan informasi (TI).

Pendidikan adalah kunci kehidupan

Berasal dari orang tua yang berprofesi di bidang pendidikan, menginspirasi Encep untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya. Ayahnya, Memed Parmawijaya, adalah seorang guru. Saat Encep masih kecil, ia harus sering ikut ayahnya berpindah-pindah rumah. Hal itu dilakukan agar ayahnya dapat mengajarkan ilmunya hingga ke pelosok desa. Bahkan ia pernah ikut tinggal di desa yang masih belum teraliri listrik. Namun demikian, Encep belajar bahwa pendidikan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan taraf kehidupan yang lebih berkualitas.

Di sisi lain, ayahnya juga mengajarkan kedisiplinan dan tepat waktu. Sebagai guru, sosok ayahnya selalu berangkat pagi untuk mengajar ke sekolah. Nilai disiplin waktu sangat kuat melekat pada dirinya. Selain itu, ayahnya juga berpesan agar dirinya selalu mengutamakan pendidikan. Ayahnya mempunyai keinginan agar ia bisa menempuh pendidikan hingga ke luar negeri. Namun, ketika dia berhasil mendapatkan kesempatan tersebut, ayahnya telah pergi lebih dahulu. Di sisi lain, sosok

Encep gemar mengisi akhir pekan dengan kegiatan di alam terbuka bersama keluarganya

Foto dok. Pribadi



ibunya, Hajar Maryani, juga mendukung kedisiplinan dari sang ayah. Tak luput ibunya selalu mengingatkan Encep agar menggunakan waktu sorenya untuk belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah secara teratur.

Bersama keluarga dan masyarakat

Mengabdikan kepada negara memang membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Encep sadar bahwa dirinya hanya memiliki waktu yang tak imbang untuk keluarganya. Namun demikian, istrinya, Fitri Estikasari, dan kedua anaknya, M. Daffa Mauldine dan Dinara Dariska Alifia, selalu mendukungnya. Di akhir pekan, ia selalu mengajak keluarganya untuk pergi keluar bersama. Ia juga sering mengajak anak-anaknya untuk pergi ke gunung atau ke sungai. Tujuannya agar anak-anaknya dapat lebih mencintai dan mengenal alam. Selain itu, ia juga ingin menularkan hobi pecinta alamnya.

Selain menghabiskan waktu bersama keluarga, Encep juga sering menghabiskan waktu akhir pekannya untuk membantu sesama. Kegiatan filantropis pun ia galang bersama teman-temannya. Misalnya, ia mengangkat beberapa anak asuh dan membangun toilet umum untuk daerah terpencil yang sanitasinya masih kurang. Tujuannya adalah agar ia semakin bersyukur kepada Tuhan dan mendapatkan kepuasan batin.

Harapan

Terkait harapan terhadap institusinya, Encep ingin mewujudkan salah satu fungsi DJKN sebagai asset manager dengan membuat database dan sistem BMN yang lengkap. Menurutnya, ke depan, hal itu akan mampu meningkatkan pendapatan negara melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena semua BMN dan penggunaannya teregistrasi. “Sistem ini bisa *trace* penerimaan negara ini dari mana sumbernya. Misalkan dapat pemasukan 10 miliar dari sewa BMN. Kita bisa tahu asetnya dari mana, cara pembayarannya pakai apa, Kementerian/Lembaga pengguna asetnya siapa, satuan kerjanya apa. Kalau sudah ketauan itu kita akan mudah untuk memprediksi penerimaan tahun depan,” harapnya.

Sementara itu, secara pribadi ia ingin agar bisa melakukan hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Salah satunya, mempunyai keinginan untuk menulis buku setelah memasuki masa purnabakti. Di samping itu, ia juga ingin lebih fokus untuk bergerak di bidang kemanusiaan atau filantropis. “Nanti kalau sudah pensiun saya mau fokusnya ke kegiatan sosial itu,” ujarnya sambil berharap.

Teks Abdul Aziz

Perekonomian Indonesia Siap Lepas Landas

Dalam jangka menengah, Indonesia dapat tumbuh di level 5-5,5 persen dengan cukup mudah.

Terdapat fakta menarik di balik pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya sedikit meningkat di tahun 2017. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, investasi tumbuh jauh di atas 5,0 persen dalam setahun dan berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi secara umum yang tertahan oleh konsumsi yang relatif rendah. Ke depannya, menjaga stabilitas sumber-sumber pertumbuhan ini penting, terutama dengan risiko yang terlihat di awal 2018.

Kinerja perekonomian Indonesia 2017 sesuai rilis terkini

Kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2017 sebagaimana dilansir oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan sedikit perbaikan saja. Secara tahunan, perekonomian yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) ini hanya bertumbuh 5,07 persen, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 5,03 persen. Meskipun meningkat, pertumbuhan ekonomi ini cenderung lebih rendah dibandingkan negara-negara lainnya yang menjadi mitra dagang utama Indonesia seperti India, Tiongkok, Vietnam, dan Malaysia. Indikator lainnya seperti pendapatan per kapita juga menunjukkan bahwa kinerja perekonomian masih perlu diakselerasi ke depannya.

Sumber pertumbuhan perlu dijaga

Terdapat empat komponen PDB berdasarkan pengeluaran, yaitu konsumsi, investasi, sektor Pemerintah, dan nilai

ekspor bersih. Dari total pertumbuhan ekonomi, konsumsi menjadi penyumbang terbesar yaitu 2,76 persen atau lebih dari separuhnya. Meskipun penyumbang terbesar, jumlah sumbangan konsumsi menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan pertumbuhan konsumsi tidak sebesar pertumbuhan komponen lainnya.

Secara tahunan, konsumsi hanya bertumbuh 4,98 persen atau lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya faktor penahan yang salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga barang (inflasi). Selain lebih tinggi dari tahun 2016, kenaikan harga di Indonesia juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Hanya Malaysia yang kenaikan harganya lebih tinggi di tahun 2017. Selain kenaikan harga yang ditengarai menjadi penyebab penurunan daya beli masyarakat, penurunan konsumsi juga disinyalir disebabkan oleh adanya perubahan pola konsumsi masyarakat yang selaras dengan hasil survei rumah tangga yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Meskipun konsumsi rumah tangga tertekan, komponen lainnya seperti investasi, ekspor bersih, serta konsumsi Pemerintah dapat tumbuh cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menopang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan investasi cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya ataupun lima tahun terakhir yang tidak pernah mencapai lebih dari 5 persen. Tahun 2017, investasi tercatat tumbuh 6,15 persen, bahkan di dua kuartal terakhir pertumbuhannya mencapai lebih dari 7 persen.

Selain diindikasikan berasal dari peralihan konsumsi, pencapaian investasi ini juga merupakan hasil dari beberapa faktor lainnya, seperti stabilitas makro ekonomi, iklim investasi yang membaik sebagai hasil dari penyederhanaan prosedur dan deregulasi investasi, pemberian insentif fiskal, sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan perbaikan skema kerjasama pembangunan infrastruktur antara Pemerintah dan badan usaha. Faktor terakhir didukung oleh data realisasi penanaman modal di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menunjukkan besarnya kontribusi sektor listrik, air, dan gas.

Meskipun sudah banyak diakui oleh komunitas internasional

seperti PBB dan Bank Dunia masing-masing melalui *World Investment Report* dan survei *Ease of Doing Business* dimana peringkat Indonesia berhasil mencapai di atas peringkat Tiongkok, tentunya investasi masih bisa ditingkatkan, terutama investasi langsung sebagai jenis investasi yang sangat *sustainable*¹. Untuk kawasan Asia Tenggara, investasi langsung ke Indonesia berada dibawah Singapura dan Malaysia. Sedangkan di kawasan Asia, investasi langsung yang masuk ke Indonesia hanya 0,6 persen dari total investasi langsung di kawasan.

Di luar investasi, nilai ekspor bersih juga meningkat sehingga berkontribusi ke total pertumbuhan PDB sebesar 0,3 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Faktor positif seperti kenaikan ekspor sektor manufaktur, kondusifnya harga komoditas dunia, serta kebijakan relaksasi energi telah mendukung kenaikan ini. Namun demikian, kinerja ekspor bersih perlu terus ditingkatkan stabilitasnya. Pertumbuhan nilai ekspor bersih di kuartal keempat yang menurun dan bernilai negatif 0,67 miliar dolar AS di Januari 2018 sebagai akibat kenaikan impor yang cukup

tinggi perlu diwaspadai lebih lanjut.

Konsumsi Pemerintah sebagai pemegang *share* terkecil juga memiliki andil positif terhadap pertumbuhan PDB. Ini dilakukan dengan tetap menjaga stabilitas fiskal yang termasuk terbaik di kawasan. Keseimbangan fiskal Indonesia di tahun 2017 hanya lebih rendah dari Singapura dan Australia.

Stabilitas terjaga meski terdapat risiko

Indikator keseimbangan eksternal seperti nilai tukar Rupiah cukup stabil, baik di 2017 maupun awal 2018, meskipun mulai terlihat adanya risiko di bulan Februari 2018. Pada bulan Januari, nilai tukar Rupiah terapresiasi satu persen menuju Rp13.413 per dolar AS dari posisi penutupan akhir 2017 seiring cadangan devisa yang meningkat menjadi sebesar 131,98 miliar dolar AS. Selain itu, tingkat imbal hasil obligasi Pemerintah 10 tahun juga menurun 5,1 basis poin dari awal tahun menuju 6,27 persen.

Sedangkan di bulan Februari 2018, mulai terjadi destabilitas nilai tukar Rupiah seiring gejolak di pasar keuangan global karena sentimen kekhawatiran investor

terhadap kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR) AS. Sementara itu, peningkatan volatilitas sebesar 13 basis poin terjadi di bulan Februari 2018 sampai dengan 19 Februari 2018 dimana Rupiah ditutup di level Rp13.443 per dolar AS. Hal ini seiring dengan kenaikan *yield* sebesar 19 basis poin menuju 6,55 persen dan *outflow* di pasar saham dan obligasi Pemerintah sebesar masing-masing Rp8,44 triliun dan Rp14,64 triliun.

Dengan penajaman kebijakan, pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat

Dengan adanya perbaikan harga komoditas dan faktor penggerak konsumsi, seperti aktivitas pemilihan kepala daerah dan Presiden di 2019, pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, serta persiapan *Asian Games*, maka risiko perekonomian secara umum dinilai masih positif (*upside risk*).

Namun ke depannya, perlu diwaspadai risiko negatif sebagaimana dipaparkan di atas yaitu potensi dampak kenaikan FFR. Apabila ritme kenaikan FFR tidak sesuai dengan ekspektasi pasar, terdapat kekhawatiran gejolak pasar akan terus berlanjut. Kekhawatiran ini beralasan karena



seiring dengan aksi jual yang cukup besar pada pasar saham AS dan Indonesia pada Februari 2018.

Untuk memitigasi dampaknya ke Indonesia lebih lanjut, beberapa strategi Pemerintah untuk mencegah penarikan modal tiba-tiba (*sudden reversal*) perlu terus dilakukan, seperti menjaga keseimbangan fiskal, melakukan strategi pembiayaan *front loading*² serta melanjutkan koordinasi yang erat dengan lembaga terkait.

Selain itu, bauran kebijakan publik untuk menjaga performa sumber-sumber pertumbuhan terutama investasi juga perlu terus dilakukan. Hal ini penting di tengah keterbatasan kapasitas investasi Pemerintah saat ini.

Insentif fiskal sebagai salah satu bentuk dukungan Pemerintah akan dipertajam untuk mendukung investasi dunia usaha pada semua level. Pada level awal proses investasi, hal itu dapat dilakukan melalui dukungan dalam kemudahan berusaha, selanjutnya di level menengah dilakukan melalui penyediaan infrastruktur untuk memperlancar arus barang (logistik) dan dukungan kemudahan impor barang modal, serta di level akhir terkait kemampuan reinvestasi melalui insentif fiskal seperti keringanan pajak. Selain itu, di pasar pembiayaan, Pemerintah akan terus mendorong peningkatan akses pendanaan dan pengembangan skema pembiayaan inovatif.

- 1 Jenis investasi seperti investasi portofolio dan investasi lain bersifat *less sustainable*.
- 2 Artinya melakukan hutang di awal tahun.

Teks Adelia Pratiwi
Pegawai Badan Kebijakan Fiskal



Masyita Crystallin
Ekonom Mandiri Sekuritas

Indonesia saat ini tengah melakukan reformasi struktural melalui pembangunan infrastruktur untuk menurunkan biaya logistik dan meningkatkan keunggulan komparatif. Perkembangan pembangunan infrastruktur cukup positif. Dari target pembangunan sebesar Rp4,5 triliun, sebesar Rp1,7 triliun sudah dalam tahap konstruksi dan Rp75 miliar sudah selesai (sumber: Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas - KPPIP). Pertumbuhan Indonesia pun stabil di level sekitar 5 persen, cukup baik mengingat masih lemahnya permintaan global dan dampak pembangunan infrastruktur yang baru dapat dirasakan di jangka menengah. Meskipun cukup baik, tingkat pertumbuhan ini masih berada di bawah pertumbuhan potensial Indonesia sebesar 5,5 persen (sumber: Bank Dunia). Dalam jangka menengah, Indonesia dapat tumbuh di level 5-5,5 persen dengan cukup mudah. Namun, pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah apakah Indonesia dapat mengalami *leapfrog* pertumbuhan ke level 6-7 persen? Karena tanpa pertumbuhan di atas 6 persen, akan sulit untuk meningkatkan pendapatan per kapita menjadi sekitar 10.000 dolar AS seperti di Tiongkok atau 30.000 dolar AS seperti di Korea.

Di sisi lain, tahun 2018 diawali dengan peningkatan volatilitas perekonomian dunia. Indeks risiko mengalami peningkatan sangat signifikan di awal Februari 2018. Hampir sama dengan nilainya dengan kondisi saat puncak *taper tantrum* di musim panas 2015. Peningkatan volatilitas ini disebabkan olehantisipasi pasar terhadap

perkembangan ekonomi negara maju terutama yang berasal dari Amerika Serikat terkait dengan kecepatan dan *magnitude* kenaikan FFR. Antara tanggal 26 Januari hingga 6 Februari, S&P turun hampir 7 persen, diikuti pula oleh IHSG, yang turun sebesar 3 persen di periode yang sama. Imbal hasil obligasi juga mengalami peningkatan sebesar 20 basis poin. Hal itu juga mengikuti peningkatan imbal hasil yang terjadi di Amerika. Aliran modal keluar investor asing di Februari mencapai US\$0,85 miliar. Nilai yang cukup besar mengingat dangkalnya pasar finansial Indonesia. Nilai kapitalisasi pasar Indonesia sendiri hanya mencapai 46 persen dari PDB. Nilai itu lebih kecil jika dibandingkan negara ASEAN seperti Filipina dan Malaysia yang masing-masing memiliki kapitalisasi pasar sebesar 79 dan 121 persen dari PDB.

Menghadapi volatilitas yang lebih tinggi di 2018, Indonesia sudah lebih siap jika dibandingkan dengan kondisi sebelum *taper tantrum* di musim panas 2015. Dari sisi nilai defisit neraca berjalan, inflasi dan level cadangan devisa tercatat lebih baik. Selain itu pembangunan infrastruktur yang terus berlanjut telah meningkatkan sentimen positif investor terhadap prospek jangka menengah Indonesia. Seluruh faktor ini dapat mendukung perekonomian untuk lepas landas asalkan mesin pertumbuhan jangka panjang, yaitu sektor manufaktur – yang saat ini pun masih merupakan penyumbang nilai tambah terbesar (hampir 20 persen dari PDB) dan menjadi tiga besar pencipta lapangan pekerjaan (14 persen) – juga siap untuk lepas landas.

110 Tahun Lelang Indonesia

**Modernisasi lelang untuk Jual Beli
yang Lebih Handal dan Terpercaya**

Auction Week

**Lelang Sukarela
Koleksi Pribadi**

Bapak Jusuf Kalla dan
Ibu Mufida Jusuf Kalla,
Menteri Kabinet Kerja
dan Pejabat Lainnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA



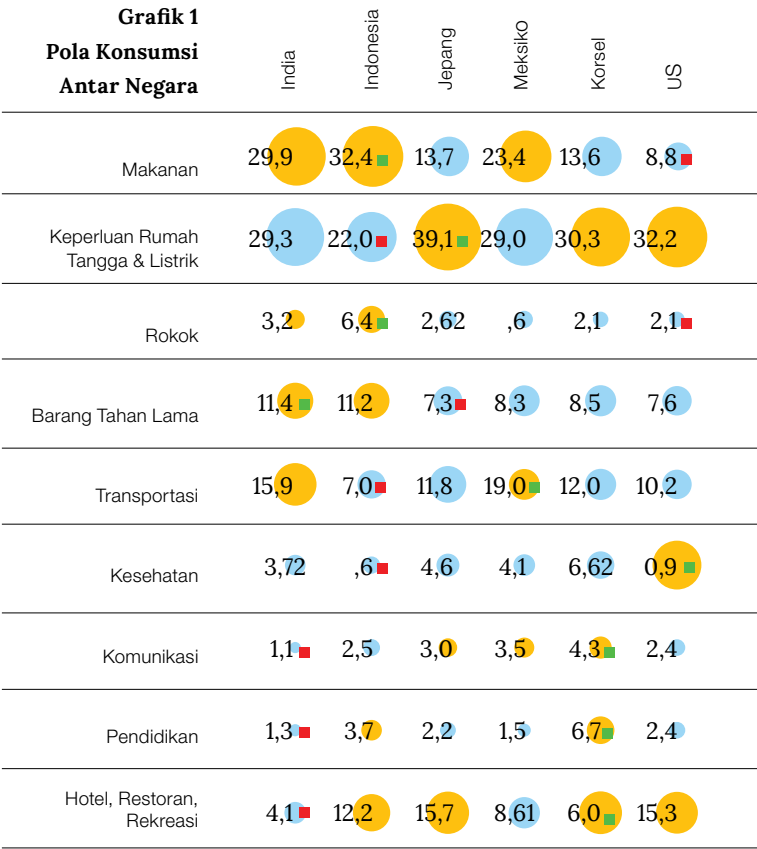
Kebijakan Fiskal dan Pola Konsumsi Rumah Tangga Indonesia

Teks Anda Nugroho,
Peneliti Muda pada Badan
Kebijakan Fiskal *)

Belakangan ini muncul kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian nasional seiring dengan melemahnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Rilis BPS pada bulan Februari 2018 menyatakan bahwa sepanjang 2017, pertumbuhan tingkat konsumsi rumah tangga nasional berada di angka 4,95 persen. Meskipun tumbuh, namun melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5.01 persen. Kekhawatiran ini semakin membesar dengan maraknya pemberitaan mengenai berbagai kios ritel skala besar yang mulai menutup usahanya.

Paling tidak ada tiga faktor utama yang mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga. Faktor yang pertama yaitu tingkat pendapatan rumah tangga. Tingkat pendapatan merupakan faktor kunci yang menentukan tingkat konsumsi maupun tabungan (*saving*) rumah tangga. Ketika pendapatan meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat, dan sebaliknya. Namun demikian, ketika pendapatan menjadi nol, bukan berarti konsumsi juga akan menjadi nol. Hal tersebut dikarenakan konsumsi mutlak diperlukan untuk pemenuhan *basic need*.

Faktor kedua yang mempengaruhi pola konsumsi yaitu harga barang atau komoditas konsumsi. Harga berperan dalam membentuk daya beli rumah tangga. Tingkat perubahan harga biasanya diukur dengan *Consumer Price Index (CPI)* atau inflasi. Semakin



Sumber: Diolah dari data SUSENAS modul konsumsi 2017 dan eurosat

di atas rata-rata di bawah rata-rata tertinggi terendah

tinggi CPI, maka daya beli rumah tangga akan makin turun, sehingga konsumsi juga turun. Kondisi yang sama juga akan berlaku sebaliknya. Terakhir, faktor preferensi konsumen (*consumer taste*). Preferensi konsumen menentukan *behaviour* konsumsi rumah tangga yang berada di luar motif ekonomi. Preferensi konsumen tersebut sifatnya lebih subjektif dan dibentuk oleh berbagai hal, antara lain adalah tingkat pendidikan, *culture*, atau budaya yang dianut, nilai-nilai individual, dan berbagai faktor lain.

Pola konsumsi antarnegara

Perbandingan pola konsumsi antarnegara sebagaimana disajikan dalam grafik 1 merefleksikan kondisi perekonomian dan preferensi konsumen pada negara yang bersangkutan. Pada negara berkembang, konsumsi akan lebih didominasi oleh kebutuhan pokok berupa bahan makanan. Untuk negara maju, porsi konsumsi akan lebih bergeser ke barang tersier (jasa). Hal tersebut sejalan dengan hukum Engel, dimana ketika pendapatan meningkat, porsi pengeluaran untuk bahan makanan akan menurun.

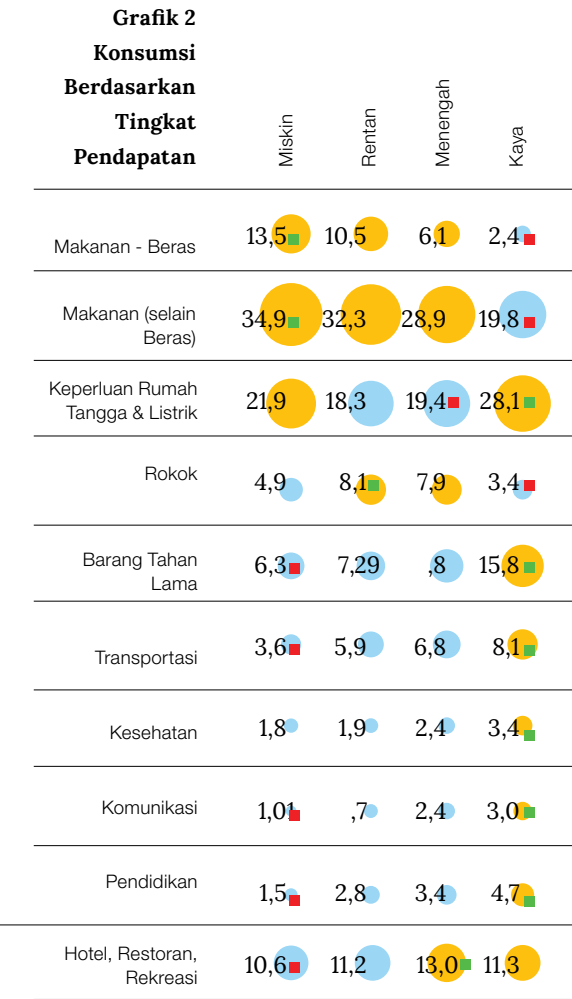
Rumah tangga di Indonesia mengalokasikan sekitar 32,4 persen konsumsinya untuk makanan. Nilai tersebut paling besar di antara keenam negara yang ditampilkan. Umumnya, alokasi makanan di negara berkembang mencapai lebih dari dua kali lipat dari negara maju.

Kondisi ini membuat konsumen di negara berkembang lebih sensitif terhadap perubahan harga komoditas makanan.

Pada ranking kedua, rumah tangga di Indonesia mengalokasikan 23 persen konsumsinya untuk keperluan rumah tangga, termasuk listrik, air, dan gas. Meskipun menempati ranking kedua, alokasi yang dilakukan oleh rumah tangga di Indonesia termasuk di bawah rata-rata. Rumah tangga di Indonesia mempunyai prestasi buruk dalam hal konsumsi rokok. Alokasi konsumsi rokok di Indonesia paling besar di antara keenam negara yang disajikan. Alokasinya mencapai 6,4 persen dari total konsumsi. Alokasi ini juga mencapai dua kali lipat dari India yang merupakan sesama negara berkembang.

Pola konsumsi berdasarkan tingkat pendapatan

Pengamatan terhadap pola konsumsi rumah tangga akan lebih menarik apabila diperdalam berdasarkan distribusi pendapatannya. Berdasarkan distribusi tersebut, rumah tangga dapat dibagi menjadi kategori miskin, rentan, menengah, dan kaya. Rumah tangga miskin kurang lebih berada pada 10 persen pendapatan terbawah. Pada posisi di atasnya sampai dengan 40 persen, pendapatan terendah terdapat rumah tangga rentan. Disebut rentan karena rumah tangga ini

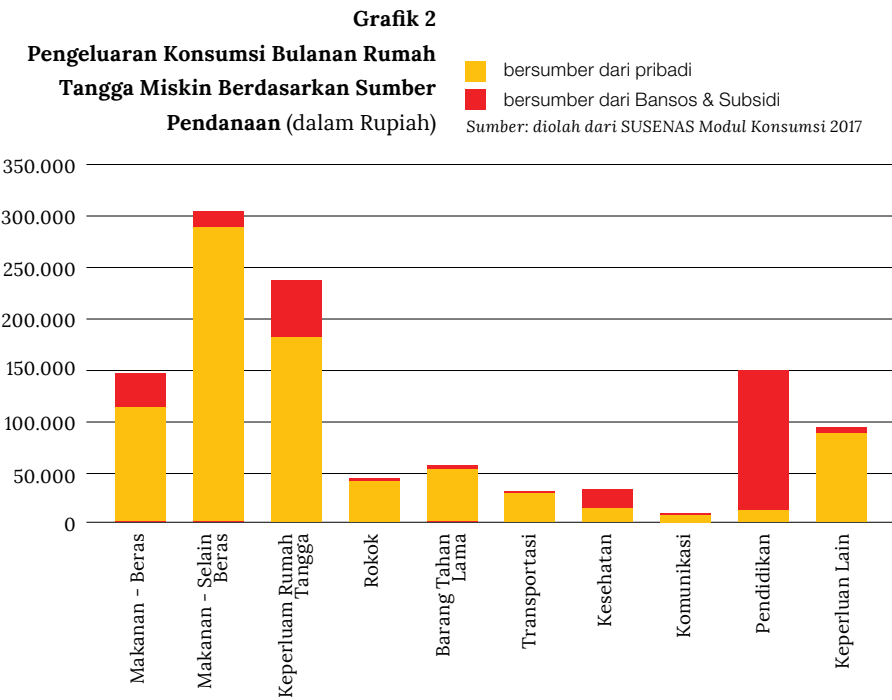


(sebelum di-adjust dengan subsidi dan bansos)

Sumber: diolah dari SUSENAS Modul Konsumsi 2017

rentan jatuh miskin jika sewaktu-waktu terjadi gejolak ekonomi yang memukul telak daya beli mereka. Di atasnya lagi, ada rumah tangga kelas menengah sampai dengan 90 persen perndapatan teratas dan kaya yang berada di 10 persen pendapatan teratas.

Rumah tangga miskin dan rentan masing-masing membelanjakan 13,5 persen dan 10,5 persen pengeluarannya hanya untuk satu jenis komoditi, yaitu beras. Porsi tersebut mencapai dua kali lipat porsi pengeluaran rumah tangga menengah, atau lima kali lipat porsi pengeluaran rumah tangga kaya. Dengan kondisi yang demikian, kenaikan harga beras akan lebih banyak menyakiti rumah tangga miskin



dan rentan dibandingkan rumah tangga menengah dan atas. Pola ini sangat penting untuk dijadikan catatan bagi para pembuat kebijakan.

Hal yang cukup memprihatinkan, untuk porsi pengeluaran konsumsi rokok, angka terbesar justru ditemui pada rumah tangga rentan. Alokasi konsumsi rokok mencapai 8,1 persen terhadap total konsumsi rumah tangga rentan. BPS menyatakan bahwa rokok masih menjadi komoditas terbesar kedua setelah beras yang paling mempengaruhi garis kemiskinan nasional.

Pada rumah tangga miskin dan rentan, keterbatasan penghasilan membuat mereka menghabiskan sebagian besar pengeluarannya untuk konsumsi makanan. Hal itu menyebabkan pengeluaran lainnya, termasuk pendidikan dan kesehatan, memiliki porsi dan nominal yang sangat kecil. Pemerintah perlu berperan aktif dalam rangka menjamin akses pendidikan dan kesehatan bagi rumah tangga kelas miskin dan rentan.

Peran kebijakan fiskal

Pemerintah dapat melakukan intervensi untuk memperbaiki pola

konsumsi rumah tangga miskin dan rentan. Intervensi tersebut ditujukan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan hidup dasar warga negara. Upaya intervensi dapat dilakukan melalui berbagai instrumen kebijakan fiskal yang dimiliki. Saat ini berbagai instrumen fiskal yang sudah dimanfaatkan untuk tujuan tersebut antara lain adalah subsidi dan bantuan sosial.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin bisa berasal dari dua sumber, yaitu dari pengeluaran pribadi dan dari pengeluaran pemerintah melalui berbagai subsidi dan bantuan sosial. Grafik 3 menunjukkan hasil *mapping* konsumsi rumah tangga miskin berdasarkan sumber dananya. Berbagai program subsidi dan bansos yang dicakup dalam perhitungan tersebut antara lain adalah subsidi LPG tabung 3 Kg, subsidi listrik, Program Beras Sejahtera (RASTRA), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Jaminan Kesehatan Nasional khusus Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah.

Menurut hasil perhitungan, setiap rumah tangga miskin rata-rata menerima bantuan dari pemerintah

sekitar Rp268.885 per bulannya, baik sifatnya langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian pemerintah setidaknya berkontribusi sebesar 25 persen terhadap total pengeluaran rumah tangga miskin setiap bulannya. Rinciannya, kontribusi pemerintah untuk pengeluaran pendidikan rumah tangga miskin sebesar 92 persen, kesehatan sebesar 54 persen, keperluan rumah tangga (termasuk listrik dan gas) sebesar 24 persen, konsumsi beras sebesar 23 persen, dan pengeluaran konsumsi lainnya kurang lebih 5 persen.

Bantuan pemerintah tersebut sangat membantu rumah tangga miskin dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi mereka. Bukan hanya bermanfaat bagi rumah tangga miskin, bagi pemerintah, pengeluaran yang dilakukan akan menjadi investasi sosial yang akan dipetik manfaatnya di masa yang akan datang. Dengan memberikan akses kebutuhan dasar, baik makanan, pendidikan, dan kesehatan, diharapkan kemiskinan dapat berkurang dan kualitas sumber daya manusia dapat meningkat.

Penutup

Pemerintah punya peran penting untuk memperbaiki pola konsumsi rumah tangga. Intervensi pemerintah ditujukan untuk menjamin bahwa rumah tangga, terutama golongan miskin dan rentan, dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak, baik pemenuhan kebutuhan makanan, pendidikan, kesehatan, dll. Keseriusan pemerintah dalam memperbaiki pola konsumsi rumah tangga dapat dilihat melalui berbagai kebijakan subsidi dan bantuan sosial yang telah dikeluarkan. Terakhir, intervensi pemerintah tersebut harus dijaga dan dipastikan supaya jatuh ke rumah tangga yang tepat atau dengan kata lain untuk mereka yang benar-benar membutuhkan.

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SUKUK NEGARA RITEL SR-010

Jalan Tol Solo - Kertosono Seksi I
Proyek SBSN 2017

Imbalan
5,90% p.a.
dibayarkan setiap bulan



Periode pemesanan:
23 Februari - 16 Maret 2018



Minimum pemesanan: Rp5.000.000
Maksimum pemesanan: Rp5.000.000.000



Penerbitan: 21 Maret 2018
Jatuh tempo: 10 Maret 2021



Pemesanan Sukuk Negara Ritel Seri-010 Tahun 2018 dapat dilakukan di 22 Agen Penjual di bawah ini



#SukukRitel010

Investasi rakyat penuh manfaat

info lebih lanjut:
www.kemenkeu.go.id/sukukritel

Mengabdi Setelah Menyelesaikan Studi

Andri Rizki Putra memiliki minat besar di bidang pendidikan. Meski memiliki gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia, Kiki—panggilan akrabnya—mantab mengambil S2 di School of Education, Boston University, Amerika Serikat. Dengan beasiswa LPDP, penerima Penghargaan Kick Andy Young Heroes 2015 itu tengah merampungkan studi di Jurusan *Educational Leadership and Policy Studies*.

Kiki dikenal sebagai pendiri Yayasan Pemimpin Anak Bangsa (YPAB). Sejak 2012, YPAB telah memberikan kesempatan kepada ribuan masyarakat putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan kesetaraan melalui program Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA) secara cuma-cuma.

Di samping itu, YPAB juga menjadi wadah bagi profesional muda untuk menjadi relawan dan membagikan ilmunya dengan mengajar warga putus sekolah. Sebagian besar tutor YPAB adalah kalangan profesional dari berbagai profesi dengan tujuan yang sama yaitu saling berbagi ilmu.

Salah satu alasan Kiki melanjutkan studi adalah kebutuhan pengembangan YPAB. “Saya tidak punya *credentials* di bidang pendidikan dan merasa harus melakukan *upgrade skills*,” kata pemuda kelahiran Medan, 20 Oktober 1991 itu. YPAB memerlukan inovasi agar bisa terus berjalan. Sebab itu, dia yakin dengan keputusannya untuk kuliah lagi dan meninggalkan YPAB serta pekerjaan sebagai *corporate lawyer*.

Mengapa Amerika

Kiki memutuskan untuk pergi ke AS karena negara itu masih menjadi kiblat di dunia untuk berbagai sektor. Dia ingin mendapatkan ilmu dan pengalaman hidup di sana. “Misalnya, apa sih yang negara maju seperti AS miliki dan kita sebagai negara berkembang tidak miliki dari sisi sumber daya manusia,” ujar Kiki.

Di samping itu, penulis buku **Orang Jujur Tidak Sekolah** itu juga melihat bahwa AS belum banyak dituju oleh penerima beasiswa LPDP, salah satunya jika dibandingkan dengan Inggris. Keadaan ini justru membuat Kiki tertarik. Dia tidak gentar dengan proses aplikasi yang rumit. “Dari proses pendaftaran

memang lebih kompleks karena saya harus menyerahkan nilai GRE dan TOEFL serta surat rekomendasi yang memenuhi standar,” ujar Juara III Mahasiswa Berprestasi Fakultas Hukum UI 2011 itu.

Dalam proses pencarian universitas, Kiki banyak berkonsultasi dengan dua mentornya, Totok Soefijanto dan Widharmika Agung. “Saya banyak melakukan *brainstroming* dengan mereka,” kata Kiki. Menurutnya, Boston sangat menarik karena merupakan Silicon Valley-nya pendidikan di AS. Sementara pilihan Boston University didasari peringkat universitas dan jurusannya yang baik.

Pada Jurusan *Educational Leadership and Policy Studies*, Kiki banyak belajar isu-isu di bidang pendidikan, khususnya bagaimana menjadi pimpinan sekolah. Beberapa mata kuliah yang diambilnya pada semester pertama antara lain *Strategic Implementations*, *Statistics*, *School Governments*, dan *School Funding*.

Di samping mendapat ilmu dari mata kuliah yang diambil, Kiki juga belajar membuka pikiran. “Saya menemukan banyak cara berpikir yang membuka mata, seperti misalnya bagaimana intervensi politik dari pemerintah federal di sini memberi pengaruh terhadap hasil-hasil riset yang dihasilkan di lingkungan universitas,” ujarnya.

Contoh pembelajaran lain yang didapatkan Kiki adalah bagaimana anak-anak muda di AS bekerja keras paruh waktu untuk membiayai pendidikan mereka. Tidak semua orang tua di AS



mampu membiayai anak-anak mereka di tingkat universitas. “Bahkan mungkin di tingkat kelas menengah, untuk bisa masuk ke perguruan tinggi, mereka semua bilang ‘it’s expensive, very expensive,’” kata Kiki.

Kiki mengaku sedikit terkejut dengan fakta yang ditemuinya. “Mayoritas dari mereka kerja di kampus bukan karena mau cari duit beli Iphone X, tapi karena harus bayar *student loan*,” ujar Kiki. Dari situ, sudut pandangnya berubah. Dia menemukan sedikit kemiripan dengan para peserta program YPAB. “Saya sekarang melihat peserta didik di YPAB bukan masyarakat kelas dua yang butuh pendidikan untuk meningkatkan status. Mereka adalah orang yang juga punya masa depan,” kata Kiki.

Semester pertama

Mengambil program S2 dengan durasi setahun, Kiki saat ini telah melalui semester pertama. Dia bersyukur memperoleh IPK nyaris sempurna. Meskipun sudah mulai bisa beradaptasi, dia menceritakan bahwa proses penyesuaian diri di sana berat. “Saya tidak pernah tinggal jauh dari keluarga dalam waktu lama,” kata Kiki. Bahasa juga menjadi hal yang menantang bagi salah satu lulusan termuda di Fakultas Hukum UI itu. Dalam kelas-kelas yang diambilnya, 80 persen mahasiswa berasal dari AS.



Andri Rizki Putra, Penerima Beasiswa LPDP

Foto dok. pribadi.

Tidak mudah bagi Kiki untuk memahami seluruh perbincangan dan kemudian meresponnya. “Mau tidak mau saya harus beradaptasi dan percaya diri untuk menuangkan ide dan pendapat saya di kelas,” ujar Kiki. Acara-acara perkumpulan mahasiswa seperti Halloween dan Thanksgiving sering didatangi Kiki untuk mempraktekkan komunikasi verbal sekaligus menjalin jaringan.

Rencana pulang

Ada banyak rencana yang ingin dilakukan Kiki setelah pulang. Kiki masih ingat bahwa motivasi untuk mengabdikan dituangkannya dalam esai kontribusi terhadap Indonesia sebagai salah satu syarat pendaftaran LPDP. “Salah satu tujuan saya adalah ingin membantu pemerintah meningkatkan jumlah murid dan memperluas ruang belajar,” ujarnya. Dia juga ingin membesarkan YPAB agar bisa memberikan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat.

Kiki memiliki pesan kepada generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan dengan beasiswa LPDP. “Menurut saya, berpikir sebelum memutuskan itu penting sekali. Jangan mengambil S2 atau hanya karena bosan di Indonesia, pelarian dari pekerjaan, atau cuma ingin memperoleh gelar,” ujarnya.

Kiki menekankan agar tujuan studi harus jelas dan jalani tahapan seleksi dengan jujur. “Jangan mengarang cerita saat menulis esai dan seleksi wawancara hanya supaya dapat beasiswa, tapi sebenarnya tidak berencana untuk melakukannya,” kata Kiki lagi. Terakhir, para calon penerima beasiswa LPDP juga harus memiliki komitmen untuk kembali ke Indonesia. “Untuk *beresin* Indonesia dan untuk berkontribusi di bidang masing-masing,” pungkasnya.

Teks Dwinanda Ardhi Swasono

Kebijakan Perpajakan untuk E-commerce

Teks Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi



Ilustrasi
Dimach Putra

Seiring dengan meningkatnya kualitas jaringan internet dan harganya yang kian murah, *e-commerce* di Indonesia bertumbuh dengan cepat. *E-commerce* memiliki keunggulan yang tidak dimiliki transaksi perdagangan konvensional. Beberapa keunggulan tersebut antara lain akses 24 jam terhadap barang yang diperdagangkan, tiadanya batas wilayah bahkan batas negara dalam melakukan transaksi, efisiensi biaya

perdagangan (karena tidak perlu penjaga toko, gudang, atau toko secara fisik), dan lain-lain.

Di Indonesia, perubahan perilaku masyarakat dari transaksi dagang konvensional ke *e-commerce* terjadi secara bertahap. Saat metode *e-commerce* muncul lebih dari satu dekade yang lalu, volume perdagangannya masih sangat sedikit. Saat itu pembeli masih khawatir dengan kredibilitas pedagang. Selain itu aksi penipuan dengan pemalsuan

penggunaan kartu kredit sempat marak di dunia maya.

Kepercayaan masyarakat mulai meningkat seiring munculnya *market place* atau forum jual beli yang menggunakan *escrow account* atau akun bersama dimana pembayaran dilakukan saat barang sudah diterima. Testimoni positif dari pembeli juga mempengaruhi kepercayaan.

Bagi warga kota besar, transaksi *e-commerce* menawarkan kemudahan bagi pembeli yang enggan menghadapi kemacetan lalu lintas. Tak heran, banyak yang menghubungkan penutupan toko dan pusat perbelanjaan dengan peralihan pola belanja dari transaksi konvensional ke *e-commerce*.

Terlepas dari itu, pemerintah diharapkan menyiapkan kebijakan terkait *e-commerce*. Saat ini paling tidak terdapat empat kementerian utama yang terlibat dalam pengaturannya. Pertama, Kementerian Koordinasi Perekonomian (terkait peta jalan pengembangan *e-commerce*), Kementerian Komunikasi dan Informasi (terkait peraturan transaksi elektronik), Kementerian Perdagangan (terkait peraturan perdagangan), dan Kementerian Keuangan (terkait perpajakan dan bea masuk). Tentu saja hal yang akan berdampak secara langsung dan signifikan adalah kebijakan terkait perpajakan.

Terkait kebijakan perpajakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi gejolak di masyarakat. Misalnya, perlakuan yang sama antar semua metode dan *platform* perdagangan. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip keadilan. Artinya, tidak ada perbedaan perlakuan antara perdagangan konvensional maupun *e-commerce*.

Pada *e-commerce* terdapat empat *platform* yang perlakuannya juga diharapkan bisa sama yakni *online market*

place, *classified ads*, *daily deals*, dan *online retail*. Penjualan melalui media sosial bisa dikategorikan dalam *online retail*. Perlakuan yang sama juga diharapkan bagi pelaku dalam negeri dan luar negeri.

Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah efektif dan efisien dalam pengenaan pajaknya. Efektif berarti kebijakan pengenaan pajak terhadap *e-commerce* tepat dan jelas sasaran. Definisi dan batasan harus ditetapkan, sehingga batasan antara yang terkena ataupun tidak terkena pajak menjadi jelas dan transparan. Efisien berarti beban administrasi harus ditekan seminimal mungkin sehingga tidak meningkatkan biaya transaksi *e-commerce*.

Transaksi *e-commerce* menggunakan sistem digital. Sebab itu, sudah sepatutnya administrasi perpajakan yang dikenakan juga dilakukan secara digital. Kemudahan administrasi secara digital ini dapat mengurangi biaya kepatuhan dari wajib pajak pelaku *e-commerce*.

Ketiga, koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait. Sebelum kebijakan perpajakan *e-commerce* ditetapkan, perlu ada koordinasi agar kebijakan tersebut tidak tumpang tindih dengan kebijakan lainnya. Contohnya, apabila Ditjen Bea Cukai hendak mengenakan pajak/bea masuk terhadap barang digital yang tidak terlihat (*intangible goods*), terlebih dahulu perlu dilihat apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perdagangan internasional yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan.

Terakhir, adalah sosialisasi kepada masyarakat. Kebijakan perpajakan yang menyentuh langsung aspek kehidupan masyarakat biasanya rentan gejolak. Contohnya, kebijakan perpajakan dalam akses informasi terhadap penggunaan kartu kredit dan informasi batasan nilai rekening dalam bank.

Sosialisasi sebelum kebijakan perpajakan ditetapkan sangat diperlukan agar masyarakat menyadari pemberlakuannya. Pra implementasi, pemerintah dapat menggandeng pelaku besar *e-commerce* untuk menjelaskan kepada masyarakat agar tercipta kesadaran.

Saat ini, banyak yang beranggapan bahwa berdagang melalui *e-commerce* tidak dikenakan pajak. Dengan kondisi seperti ini, sosialisasi pra implementasi dapat difokuskan kepada informasi dan komunikasi tentang perlakuan perpajakan yang sama antara *e-commerce* dan konvensional. Dengan begitu, masyarakat akan menyadari bahwa *e-commerce* hanyalah sebuah metode perdagangan dan tetap dikenakan pajak seperti perdagangan konvensional.

Sosialisasi paska implementasi lebih menekankan pada kepatuhan pelaksanaannya. Tata cara, prosedur, dan mekanisme pelaporan pajak *e-commerce* dapat disosialisasikan secara masif dan melibatkan asosiasi dan profesional terkait. Pola komunikasi pemerintah harus didukung oleh banyak pihak sehingga tidak terjadi ketimpangan informasi.

Dari keempat pertimbangan tersebut di atas, terdapat hal yang paling mendasar yaitu kebijakan perpajakan tersebut jangan sampai menghambat perkembangan *e-commerce*. Kebijakan perpajakan ini seyogianya memegang prinsip keadilan namun tidak menghambat.

Dengan jumlah populasi yang sangat besar, Indonesia adalah pasar yang potensial bagi *e-commerce*. Industri ini diharapkan dapat terus berkembang terutama bagi pengusaha kecil dan menengah. Jangan sampai industri yang tengah tumbuh pesat ini menjadi layu karena kebijakan perpajakan yang kurang mendukung.

Agar Perekonomian Desa Maju, Mekanisme Dana Desa Diubah

Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Undang-Undang Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan. Untuk mendorong peran desa tersebut, maka desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sejak tahun 2015, Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar. Indonesia memiliki 74.954 desa dan 8.430 kelurahan yang menjadi sasaran Dana Desa. Pada tahun 2015, pemerintah sudah menggelontorkan Rp20,76 triliun untuk Dana Desa. Jumlah ini meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp45,98 triliun dan sebanyak masing-masing Rp60 triliun pada tahun 2017 dan 2018.

Sebagai turunan Undang-Undang Desa, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. PP ini telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir menjadi PP Nomor 8 Tahun 2016. Ketentuan teknis PP dimaksud diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, khususnya ketentuan terkait Penyaluran,

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.

Pada tahun 2018, Dana Desa disalurkan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Presiden memberikan arahan agar pelaksanaan Dana Desa dilakukan dengan skema padat karya tunai (*cash for work*), dan dapat dilaksanakan mulai bulan Januari 2018. Untuk mendukung pelaksanaan arahan tersebut, Menteri Keuangan menetapkan PMK Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (PMK Nomor 225) yang ditetapkan Menteri Keuangan tanggal 29 Desember 2017.

Tiga Tahap Penyaluran

PMK Nomor 225 memuat perubahan ketentuan tahapan penyaluran Dana Desa, dari semula dua tahap menjadi tiga tahap dan perubahan persyaratan penyaluran. Pasal 99 dan 100 PMK Nomor 225 mengatur bahwa penyaluran tahap

I sebesar 20 persen, disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni. Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik. Persyaratan lain adalah diterimanya dokumen persyaratan penyaluran berupa surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan dan Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian Dana Desa per desa.

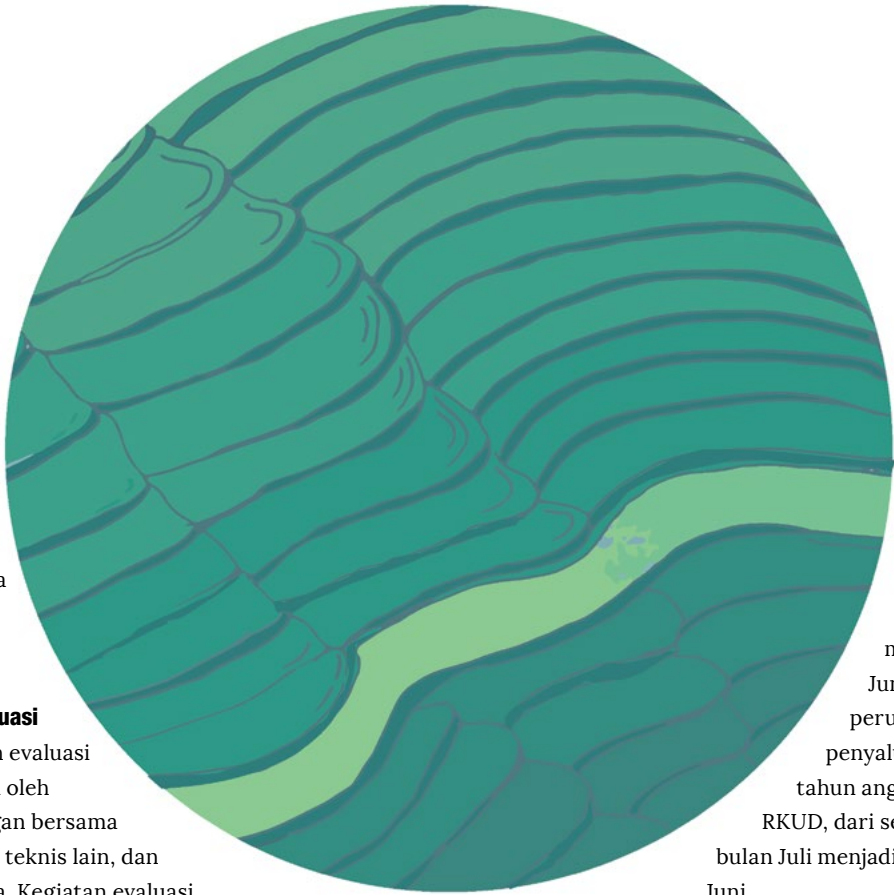
Penyaluran Dana Desa tahap II sebesar 40 persen dapat disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni dengan persyaratan adanya Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya, pencairan Dana Desa tahap III sebesar 40 persen dapat disalurkan paling cepat bulan Juli dengan persyaratan adanya penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan

Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II.

Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi Dana Desa dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian teknis lain, dan oleh Bupati/Walikota. Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK fisik dan Dana Desa merupakan evaluasi perhitungan pembagian besaran Dana Desa setiap desa dan evaluasi atas Laporan Realisasi Penyaluran dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dan Capaian Output Dana.

Dalam rangka mengakomodir beberapa masukan agar desa yang berkinerja baik tidak terganggu dengan desa yang mempunyai kinerja kurang baik, pemerintah mengubah ketentuan persentase penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dalam Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II, yaitu dari minimal 90 persen menjadi 75 persen. Selain itu, Pasal 100 ayat (2) PMK Nomor 225 mengatur rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50 persen. Capaian output dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh desa.



Ilustrasi Venggi Ovisa

Selain aturan evaluasi oleh Kementerian Keuangan, PMK Nomor 225 juga mengubah aturan evaluasi oleh Bupati/Walikota. Bupati/Walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa, apabila belum menerima dokumen persyaratan penyaluran dan adanya sisa Dana Desa dalam RKD pada tahun anggaran sebelumnya yang melebihi 30 persen, atau ada rekomendasi dari aparat pengawas fungsional di daerah. Bupati/Walikota dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda apabila telah terpenuhinya beberapa hal yaitu telah diterimanya dokumen yang dipersyaratkan, sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah berkurang menjadi maksimal 30 persen, dan terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. Perubahan yang diatur adalah perubahan batas waktu pemanfaatan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di Rekening Kas Desa (RKD) di atas 30 persen, dari semula

minggu pertama bulan Juli menjadi minggu kedua bulan Juni. Selain itu, terdapat perubahan batas waktu penyaluran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di RKUD, dari semula minggu pertama bulan Juli menjadi minggu kedua bulan Juni.

Penutup

Untuk mendukung program *cash for work* yang menysasar sektor padat karya, pemerintah telah mempercepat pencairan Dana Desa yang biasanya dilaksanakan bulan April, diubah menjadi Januari. Selain itu, untuk memantau pelaksanaan program tersebut, terdapat penambahan kolom swakelola dalam Laporan Realisasi Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa dan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa, yang memuat jumlah tenaga kerja, durasi pelaksanaan kegiatan, dan upah. Hal ini dimaksudkan sebagai alat pemantau pelaksanaan program padat karya tunai pada kegiatan Dana Desa yang dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 12 juta dan dapat meningkatkan perekonomian desa.

Teks Budi Sulisty



Apresiasi Pekerja Seni di Birokrasi

Bekerja di kantor tidak selalu duduk di balik meja, dan pulang ketika jam kerja usai. Kegiatan yang monoton akan menimbulkan kebosanan bagi para pegawai. Diperlukan hal-hal positif untuk selingan agar terbangun suasana nyaman dan kerja yang sehat. Itulah yang dilakukan tiga dara bersuara emas dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I. Grup vokal yang menamakan diri Doa Ibu ini berpendapat bahwa seorang pegawai lebih baik jika memiliki potensi lain di luar kapasitasnya sebagai pekerja kantoran.

Grup vokal ini beranggotakan Andita Ayu Marlina (Dita), Hana Anggraeni Suharyanto (Hana) dan Darminati Ajeng Indrastiti (Ajeng). Mereka bertiga awalnya terbentuk secara tidak sengaja. Kala itu, Kepala Kanwil Jawa Tengah I menugaskan mereka untuk mengisi sebuah acara pada Ramadhan tahun lalu. Dita, Hana, dan Ajeng pun sering bertemu untuk berlatih

vokal demi mulusnya penampilan saat acara berlangsung.

Ikut kompetisi Tax Factor

Tak lama, Kantor Pusat DJP menyelenggarakan Tax Factor yang merupakan ajang untuk mencari bakat-bakat bersuara emas di lingkungan DJP seluruh Indonesia. Acara tahunan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Oeang Republik Indonesia ke-71. Peserta dari Kantor Pajak Pratama (KPP) di seluruh Indonesia telah mengalami saringan ketat melalui seleksi Youtube.

Dita, Hana, dan Ajeng berusaha memberikan penampilan terbaik sebagai perwakilan dari Kanwil DJP Jawa Tengah I. Pertama, mereka mengirimkan video berisi dua lagu yang mereka nyanyikan. Latihan pun dilakukan di sela-sela waktu kerja atau setelah jam kerja usai. Dengan rutin berlatih, Dita, Hana, dan Ajeng tetap memprioritaskan tanggung jawab di



Saat tampil pada acara Tax Factor 2017

Foto Paruhum H.

Menjaga hubungan dan komunikasi satu sama lain

Foto Anas Nur Huda

kantor. Kesibukan baru ini tak serta merta dianggap sebagai beban, namun menjadi sebuah kesempatan dan pengalaman yang baik untuk mengembangkan potensi.

Kerja keras mereka saat berlatih akhirnya membuahkan hasil. Dita, Hana, dan Ajeng tak menyangka saat mendapat pengumuman bahwa mereka berhasil lolos masuk final 12 besar. Segera mereka bertolak ke Jakarta untuk mengikuti seleksi final. Pada penampilan final, mereka tak mampu menghilangkan rasa minder saat melihat penampilan peserta lain yang begitu apik. Terlebih para juri yang menilai benar-benar sangat kompeten di bidangnya, seperti penyanyi Nicky Astria, Noe Java Jive, dan Uci Nurul.

Bagi Dita, Hana, dan Ajeng, tampil di panggung seleksi final Tax Factor merupakan kebahagiaan tersendiri. Setelah membawakan satu lagu, keriuhan penonton tak bisa terbendung. Para penonton dan juri tak segan-segan turut memberikan *standing applause*. Grup Doa Ibu akhirnya sukses memboyong peringkat Terbaik I dalam acara yang berlangsung di Aula Cakti Budi Bhakti, Kantor Pusat DJP, Jakarta pada 8 November lalu.

Banyak cerita yang mereka lalui saat mengikuti audisi Tax Factor. Dengan bertemu dan melihat penampilan para peserta lain, mereka bisa menimba pengalaman dan pelajaran baru. Salah satunya saat dipertemukan oleh *coach* vokal Ivan Natadiningrat. Sang *coach*

benar-benar memberikan banyak masukan kepada mereka untuk bisa membawakan penampilan lebih baik.

Menjaga hubungan satu sama lain

Berawal dari tidak mengenal satu sama lain, menjadi akrab dan saling mengagumi adalah hal yang mereka lalui hingga sekarang. Keterikatan mereka dalam grup Doa Ibu ini berusaha dijaga dengan baik dengan saling memahami karakteristik masing-masing.

“Kalau dia (Hana) itu panikan, dia paling terorganisir. Semua jadi terorganisir. Kalau Dita itu paling santai, *ngikut* saja. Kalau saya, mirip Hana, tapi lebih terorganisir dia. Tapi yang jelas kami bisa saling menutupi kekurangan, kalau ada yang tidak bisa *nyiapin* sesuatu ya yang lain bisa menyiapkan,” ujar Ajeng sambil tertawa. Diantara mereka bertiga, Ajeng terbilang paling senior.

Hana pun mengakui, suara Ajeng sangatlah *powerfull* dan itu menjadikan mereka lebih termotivasi untuk terus belajar menyanyi lebih baik lagi. “Hana itu orangnya teliti, teratur, dan sering memberi masukan. Hana juga memiliki suara yang sangat lembut. Kalau Ajeng itu bersuara *powerfull* dan seorang ibu yang baik. Mereka berdua adalah *role model* bagi saya,” ujar Dita yang senang bereksperimen dengan riasan wajah (*make up*) ini

Membagi waktu kerja dan bernyanyi

“Kami latihan menyanyi paling mudah setelah jam kantor, cuma tidak bisa lama, paling selesai sampai jam 7. Seperti besok kami diminta mengisi acara, waktu latihannya ya terbatas sekali, *kan* pekerjaan juga *numpuk*,” ujar Hana.

Untuk menjaga stamina, mereka memilih ramuan tradisional. Ajeng, Hana, Dita ruti mengonsumsi kencur dan obat herbal. Kondisi badan yang fit adalah keharusan. Dengan mengemban tanggung jawab sebagai pegawai, penyanyi, dan ibu, aktivitas yang mereka lakukan tiap hari sangatlah padat. Di samping itu, tanaman herbal alami seperti kencur membantu suara lebih baik ketika bernyanyi dan menjaga tubuh tetap bugar.

Prestasi yang mereka raih dalam ajang Tax Factor tentu tak lepas dari dukungan orang sekitar. “Saat harus pergi mengikuti seleksi di Jakarta, keluarga sangat mendukung sekali. Kami juga berterima kasih kepada atasan dan teman-teman di kantor yang terus menyemangati kami saat latihan dan proses seleksi. Saat kami harus izin tidak bertugas di kantor, teman-teman juga yang *memback-up* pekerjaan kami sementara,” tutur Dita sembari tersenyum.

Ajeng, Hana, dan Dita berpendapat banyak pegawai di lingkungan DJP pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya yang mempunyai bakat di bidang seni selain menyanyi. Misalnya seperti fotografi, menulis, menggambar, atau berolah raga. Ajang Tax Factor yang memfasilitasi pegawai dengan bakat tarik suara ini memang patut diacungi jempol. Kementerian Keuangan tak hanya memiliki potensi sumber daya di bidang pengelolaan keuangan negara, namun juga bakat-bakat seni yang patut diapresiasi.

Yani Oktaviani



Memberi untuk Menerima

“Youth is happy because it has the capacity to see beauty. Anyone who keeps the ability to see beauty never grows old,”
Franz Kafka

Sebuah nasihat mahsyur menyebutkan bahwa ketika kita memberi sejatinya kita akan menerima. Hal ini juga berlaku bagi kegiatan sukarela. Kesukarelawanan (*volunteering*) sesungguhnya tak hanya menimbulkan perasaan altruistik. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh *Rotman Research Institutes at Baycrest Health Sciences* (2014) disebutkan bahwa orang dewasa yang aktif dalam kegiatan sukarela (*volunteering*) akan memiliki tingkat kesehatan secara umum yang lebih baik, pengurangan gejala depresi, dan berusia lebih panjang. Artinya, menjadi lebih bermanfaat dengan mengikuti kegiatan sukarela adalah hal yang membahagiakan yang akan memberikan manfaat kembali pada diri sendiri.

Meski kegiatan sukarela identik dengan pelaku yang berusia muda, akan tetapi banyak juga mereka yang berusia tidak lagi muda aktif dalam kegiatan sukarela. Saya menyebutnya orang-orang yang berjiwa muda.

Jiwa muda bukanlah tentang berapa bilangan usia yang sedang berjalan. Kesimpulan penelitian *English Longitudinal Study of Ageing* (2012) menyatakan bahwa persepsi terhadap usia merupakan cara yang cepat dan mudah untuk memprediksi usia. Mereka yang merasa lebih muda dibandingkan usia sebenarnya biasanya adalah mereka yang memiliki gaya hidup sehat dan keinginan untuk hidup lebih lama.

Bukan hanya itu, pikiran juga memainkan peran yang signifikan tentang apakah seseorang akan ‘menua’ secara lebih cepat atau lebih lambat dibanding usia sebenarnya. Manusia bisa menggunakan pikirannya untuk mempercepat atau memperlambat proses penuaan. Biasanya, orang yang lebih bahagia adalah orang yang terlihat lebih muda. Sebab, semakin seseorang memiliki harapan, optimisme, dan kebahagiaan sebagai prioritas hidup, ia akan nampak semakin muda.

Maka, sudahkah Anda siap untuk berkontribusi secara sukarela dan menjadi lebih bermanfaat untuk sesama? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa mengharapkan balasan. Hal-hal yang bisa membuat hidup kita menjadi semakin bermakna.

Sebagaimana Winston S. Churchill mengatakan, “*We make a living by what we get. We make a life by what we give.*”. Lagipula, bukankah sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama?

Teks Monika Yulando Putri



Black Panther: Film Superhero ‘Revolutioner’ dari Marvel

“Black Panther” telah menjadi salah satu film yang paling ditunggu-tunggu oleh para penggemar *superhero* Marvel di seluruh dunia. Semenjak dirilis terbatas pada akhir Januari lalu, kritikus kompak memuji “Black Panther”; beberapa menyebutnya ‘revolutioner’ dan bahkan memberinya predikat ‘salah satu film *superhero* terbaik di abad ini’. Seiring dengan ketatnya persaingan antara *superhero* Marvel dan DC Comics, beberapa fans fanatik DC bahkan menyabotase *rating* “Black Panther” di situs-situs seperti IMDb atau Rotten Tomatoes, agar film tersebut tidak terlihat sebagai itu.

Well, saya kira itu tindakan yang berlebihan. Bagi saya, “Black Panther” jelas memiliki keunikan tersendiri dibandingkan film-film *superhero* lainnya. Black Panther adalah suatu persona berkekuatan super dalam diri tiap-tiap raja yang memimpin Wakanda, suatu negara di Afrika yang mewarisi kekayaan tersembunyi yang membuatnya lebih maju dibandingkan negara-negara lainnya di dunia. Pascawafatnya Raja T’Chaka, Pangeran T’Challa (diperankan oleh Chadwick Boseman) kembali ke Wakanda untuk meneruskan kepemimpinan dan menjadi Black Panther. Misi yang ia emban adalah merebut kembali suatu artefak yang dicuri oleh Ulysses Klaue (diperankan oleh Andy Serkis). Misi ini membuka kembali rahasia masa lalu Wakanda, termasuk mempertemukan T’Challa dengan Killmonger (diperankan oleh Michael B. Jordan) yang juga berambisi menguasai Wakanda.

Saya suka bagaimana sutradara Ryan Coogler membuat “Black Panther” terlihat etnis dan kultural. Nuansa budaya Afrika tampil kental dalam adegan upacara pemahkotaan T’Challa dan

warna-warni busana atau asesoris para karakternya. Selain itu, terdapat tema besar yang diusung “Black Panther”, khususnya mengenai keengganan Wakanda untuk membuka diri dalam pergaulan internasional; pimpinan kerajaan memilih merahasiakan kekayaan dan kemajuan teknologi Wakanda demi ketenteraman dalam negeri alih-alih membantu negara lain, termasuk membantu sesama negara Afrika. Hal-hal seperti ini membuka ruang diskusi bagi penonton, dan rasanya jarang kita temukan kesempatan seperti ini dalam film-film *superhero* lain.

Eksekusi cerita dan penokohnya terbilang memadai, walau kadang saya merasa aura Michael B. Jordan sebagai Killmonger lebih menghadirkan keseganan daripada Chadwick Boseman sebagai T’Challa. Musik pengiring yang asyik dari *rapper* Kendrick Lamar menambah keseruan dalam adegan-adegan perkelahian dan *car chase*. Dengan segala keunikannya, “Black Panther” jelas adalah film yang tepat untuk Anda tonton bersama teman-teman selepas jam kerja atau di akhir pekan.

Peresensi Akbar Saputra

Surga Kecil di Sulawesi Utara

Jika mendengar tentang Sulawesi Utara, biasanya benak kita akan langsung teringat Taman Laut Bunaken yang terkenal di mancanegara. Namun sebenarnya, provinsi yang sering disebut “Nyiur melambai” ini masih menyimpan sejuta keindahan alam dan budaya.

Rumah Pohon Urongo

Bagi Anda yang tengah berkunjung ke Sulawesi Utara, jangan lupa mampir ke Danau Tondano. Di tepi danau ini banyak warung makan apung yang menyajikan aneka olahan ikan. Rasa masakannya sungguh nikmat karena ikan yang dimasak selalu segar dan diambil langsung dari Danau Tondano.

Hembusan angin sejuk dan panorama alam di sekeliling danau terasa sangat menyenangkan. Pengunjung juga bisa dengan bebas menikmati gemiricik air dan ikan-ikan yang berenang meliuk-liuk di bawah rumah makan.

Setelah kenyang santap siang adalah waktu yang tepat untuk menikmati pemandangan Danau Tondano dari ketinggian. Belum lama ini di Tondano baru dibangun Rumah Pohon Urongo yang boleh dinaiki. Disebut demikian karena rumah pohon ini berada di Kelurahan Urongo, Kecamatan Tondano Selatan.

Sebelum mencapai rumah pohon yang dimaksud, Anda terlebih dahulu harus menaklukan Bukit Urongo. Diperlukan stamina lebih agar mampu melewati pendakian bukit ini. Namun, energi yang terkuras akan terbayar dengan rimbunnya pepohonan di sepanjang pendakian.

Saat tiba di puncak rumah pohon, pengunjung kian dipukau dengan pantulan cahaya matahari di permukaan air. Keelokan rumah pohon ini akan semakin bertambah jika kita mengunjunginya saat matahari terbit. Semburat merah dari sang fajar menimbulkan perpaduan apik antara air danau dan hijaunya pepohonan. Sungguh degradasi warna yang sempurna.

Masuk ke kawasan wisata Urongo tidak dikenai biaya. Pengelola hanya meletakkan kotak untuk menaruh uang kebersihan. Pengunjung tidak dimintai tarif, tetapi cukup mengisi seikhlasnya.

Vihara Budhayana Tomohon

Mayoritas masyarakat Kota Tomohon merupakan pemeluk agama Kristen. Namun, toleransi dengan pemeluk agama lain terpelihara dengan baik di sini. Vihara Budhayana Tomohon menjulang tinggi dengan warna merah mencolok di antara pemukiman dan ladang sayuran.

Ketika memasuki area vihara yang berada di tepi tebing ini, pengunjung diwajibkan mengisi buku tamu. Pada



Kelingking Beach dan Broken Beach.

tepian vihara terdapat 18 patung dewa yang bertugas menjaga umat sekaligus vihara. Tidak terdapat informasi tentang asal-usul vihara ini. Namun,Vihara Budhayana begitu terawat. Selain bersih, taman di halaman vihara juga dipenuhi warna-warni bunga.

Terdapat pula bangunan Pagoda Ekayana. Terdiri dari 8 tingkat yang menjulang tinggi. Di tingkat pertama, pengunjung dilarang mengambil foto karena ini area ibadah. Untuk tingkat kedua hingga kedelapan, pengunjung dipersilakan memotret. Setiap lantai dihubungkan sebuah tangga dengan kemiringan 60 derajat, cukup menguras tenaga saat menaikinya.

Setibanya di atas, pengunjung dapat merasakan sejuknya udara Kota Tomohon dan pemandangan Gunung Lokon, sebuah gunung api tertinggi di Kota Tomohon yang masih aktif. Hijaunya Gunung Lokon dengan hembusan angin segar membuat pengunjung enggan beranjak.

Di samping pagoda terdapat kolam kura-kura yang kerap disebut kolam harapan. Pada setiap sisinya terdapat prasati tentang panjang umur, bahagia, keberuntungan, harta dan pangkat yang ditulis dalam tiga bahasa yakni Indonesia, Inggris dan Cina.

Teks dan foto Herlambang Suko Prayogi, Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Musik adalah Bahasa

Foto
dok. pribadi/
instagram

beasiswa dan menimba ilmu di *Royal College of Music*, Britania Raya di bawah Bachelor of Music dengan Honours Funded Degree Programme dan berhasil lulus tahun 2013 dengan predikat *cumlaude*.

Music is my language. Itulah ungkapan dari gadis kelahiran 2 Mei 1993 ketika ditanya soal musik. Bagi Isyana, membuat lagu itu mengalir seperti sungai. Tidak pernah ada yang menyuruh, tidak pernah tertekan menulis lagu ataupun kehabisan ide. “Baginya, musik sudah seperti terapi. Jika *mood*-nya sudah bagus, dia akan menuliskan sebuah lagu,” jelasnya.

“Tetap dalam Jiwa” menjadi salah satu lagu yang melambungkan namanya di Tanah Air pada tahun 2014. Wajah cantik dan suara merdunya membuat Isyana memiliki banyak penggemar. Tahun 2018, wanita yang menyukai perumpamaan ini mengeluarkan single baru berjudul “Lembaran Buku”. Lembaran buku merupakan sebuah perumpamaan dari kenangan-kenangan masa lalu. Menurutnya, setiap episode hidup seperti lembaran-lembaran buku, dimana setiap lembaran punya awal dan akhirnya sendiri. Yang terakhir, melalui *single* terbarunya, Isyana menuliskan liriknya sendiri dan membuat musiknya bersama dengan musisi Swedia Olof Lindskog & Hayley Aitken pada awal 2017.

Meski sudah menyandang gelar musisi di usia muda, tidak menjadikan Isyana berhenti bermimpi. Ia memiliki mimpi besar membangun sebuah *music center* yang di dalamnya terdapat musik studio untuk bereksplorasi dengan musik, sekolah musik mini dan memiliki musik produser sendiri. Selain itu, ia ingin membagikan ilmu yang didapat ketika menempuh pendidikan di luar negeri.

“Aku *pengen* membagikan ilmu sama orang lain juga, karena ilmu yang aku pelajari akan mudah dilupakan kalau tidak disalurkan ke orang lain. Sekaligus berbagi pengetahuan dan manfaat,” harapnya.

Teks Yani Oktaviani

Tumbuh di lingkungan yang penuh musik, membuat musisi muda Isyana Sarasvati begitu akrab dengan musik. Sejak kecil, Isyana sudah menggilai piano. Dia menjadikan piano sebagai tempat untuk menuangkan perasaan. Tidak seperti anak kecil lainnya yang suka bermain di luar, Isyana menghabiskan waktu selama delapan jam untuk berlatih musik dengan pianonya. “Mama sempet pusing, sampai aku disuruh nonton tv, kan kebalik,” ujarnya sambil tertawa.

Selain menyukai piano, di usia 7 tahun, Isyana sudah menciptakan lagu yang diberinya judul ‘Cinta untuk Mama’. Ia juga pernah membawakan lagu yang diciptakannya sendiri pada usia 10 tahun saat memperingati hari Ibu di hadapan teman-teman sekolahnya. Kala itu, Isyana kecil belum menyadari bahwa dia mempunyai

bakat musik. Ibunya yang seorang tutor musik, mulai mengajarkannya berbagai macam alat musik.

Luana Marpanda adalah ibu sekaligus guru dan *role model* bagi Isyana sampai sekarang. Ibunda Isyana adalah orang yang memberikannya ilmu instrumen elektone. Saat terus mendapatkan kejuaraan, Isyana mulai merasa berbeda dan menyadari bahwa musik adalah *passion*-nya. Tak hanya bermain alat musik dan instrumen musik saja, Isyana menunjukkan kepiawaiannya dalam olah vokal. Ia pernah menyabet juara 1 pada kompetisi menyanyi yang diikutinya.

Bakat bermusik Isyana mengantarkannya mendapat beasiswa di Nanyang Academy of Fine Art pada usia 16 tahun. Ia mendapatkan banyak ilmu seperti komposisi musik dan pipe organ. Seakan seperti menyelami lautan musik, ia kemudian mendapat

Mas Praim

Cerita : Dimach

Gambar : Bimo Adi



**SELAMAT HARI MUSIK NASIONAL
9 MARET 2018**



Foto
Anas Nur Huda



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**